



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III (tiga)
Rapat Ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 9 Februari 2021
Waktu	: 14.20 s.d. 17.30 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 44 dari 54 Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 9 dari 12 orang Anggota: 1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) 2. Riezky Aprilia, S.H., M.H. 3. H. Sunarna, SE., M.Hum. 4. Ir. Mindo Sianipar 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 6. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 7. Drs. I Made Urip, M.Si. 8. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 9. Maria Lestari, S.Pd. 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 4 dari 8 orang Anggota:

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Ir. Ichsan Firdaus
3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
4. Alien Mus, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

6 dari 7 orang Anggota:

1. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
2. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
3. Renny Astuti, S.H., S.PN.
4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess., M.Sc.
5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
6. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

6 dari 6 orang Anggota:

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Charles Meikyansah
3. Yessy Melani, S.E.
4. H. Sulaeman L Hamzah
5. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
6. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

6 dari 6 orang Anggota:

1. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Daniel Johan, S.E.
4. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
5. Edward Tanur, S.H.
6. H. Irmawan, S.Sos., M.M.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota:

1. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
2. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
3. Bambang, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

5 dari 5 orang Anggota:

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.

5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
2. Haerudin, S.Ag., M.H.
3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota:

1. Ema Umiiyatul Chusnah

B. Pemerintah:

1. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Suharta (Kuasa Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D., FRINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
11. Syarif Syahril (Direktur BLU-LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan);
12. Fatah Setiawan Topobroto (Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia);

13. Farida Mokodompit Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
14. Achmad Ardianto Direktur Utama PT Garam (Persero).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya;
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia;
Yang terhormat Direktur Utama PT Perikanan Nusantara;
Yang terhormat Direktur Utama PT Garam; serta
Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja (Raker) ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 3 Desember 2020 dan Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 12 Januari 2021, pada hari ini Selasa, tanggal 9 Februari 2021, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas Refocusing dan realokasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Raker hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Raker hari ini dimulai pada pukul 14.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 18.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan hari ini merupakan kelanjutan dari Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 4 Februari 2021 yang sebelumnya juga diawali Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan fokus membahas surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-30/MK.20/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipotong sebesar Rp157.665.596.000,00 dari semula sebesar Rp6.652.139.393.000,00 menjadi sebesar Rp494.473.797.000,00.

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 adalah bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi. Ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan lingkungan hidup, perlindungan sosial, infrastruktur dan pariwisata. Selain itu percepatan pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 juga menjadi target Pemerintah. Maka seluruh program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengutamakan kepada kepentingan masyarakat secara luas dan merata bagi nelayan kecil.

Pembudi daya ikan kecil, petambak garam, pengolah dan pemasaran hasil perikanan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Rapat Dengar Pendapat bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lalu telah mendapatkan keputusan atau kesimpulan diantaranya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dengan tidak melakukan pemotongan anggaran kembali pada Tahun 2021.

Hal ini dalam rangka menumbuhkan dan menyelamatkan ekonomi nasional mengingat pagu anggaran KKP tidak sampai 1% dari APBN. Meminta komitmen KKP untuk menjalankan melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan target dan sasaran pedoman program, pengembangan program kegiatan Tahun 2021 untuk Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), dan Politeknik Kelautan Perikanan terutama bagi anak-anak pelaku utama Kelautan Perikanan agar mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara luas, serta pendampingan modal usaha, ketrampilan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

Untuk itu Komisi IV meminta Kementerian Kelautan Perikanan segera melakukan perubahan terhadap percepatan pemulihan ekonomi bagi keluarga nelayan, pembudidaya ikan, petambak ikan, pengolah dan pemasaran hasil ikan, serta memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan atau fokus pelatihan secara berjenjang dan mendorong inovasi produk hasil perikanan sehingga mampu bersaing di pasar global. Selain itu kedepan Pemerintah diharapkan dapat menambah pagu anggaran. Ini yang paling penting, menambah pagu anggaran KKP. Mengingat berdasarkan catatan pergerakan alokasi sejak Tahun 2016 hingga 2020 terlihat mengalami kecenderungan menurun.

- Pagu anggaran 2016 sebesar 10,6 Triliun. Realisasi 61%.
- Tahun 2017 sebesar 9,13 Triliun, realisasinya 66%.
- Tahun 2018 sebesar 7,6 Triliun, realisasi 79%.
- Tahun 2019 sebesar 5,5 Triliun, realisasinya 91%.
- Tahun 2020 sebesar 5,2 Triliun, realisasinya 91%.

Hal ini menjadi tantangan bagi Saudara Menteri yang baru untuk memperjuangkan penambahan anggaran KKP demi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Demikian pengantar yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan terkait hal tersebut diatas dengan catatan jangan terlalu lama. Karena sebetulnya kami ini batas didalam ruangan sudah ditentukan Tatibnya, ditentukan oleh Pimpinan DPR tidak boleh dari 3 jam. Tapi saya dari pagi disini dari jam 10 sudah memimpin rapat.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Bapak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu.

Namo Budhaya.

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IV DPR RI, serta para Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita diber kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI.

Dalam Rapat Kerja hari ini perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan mengenai refocusing dan realokasi belanja KKP Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S.30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021 dan beberapa perkembangan capaian kinerja.

Terkait dengan refocusing dan realokasi belanja KKP Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S.30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal refocusing dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2021. KKP dihemat sebesar Rp157.665.596.000,00 yang bersumber dari Rupiah Murni sehingga pagu APBN KKP semula Rp6,65 Triliun setelah refocusing dan realokasi menjadi Rp6,49 Triliun. Kami sampaikan bahwa dari total anggaran KKP sebesar Rp6,65 Triliun sebesar Rp2,64 Triliun merupakan alokasi untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran yang merupakan anggaran yang mengikat. Sedangkan alokasi belanja untuk pelaksanaan program adalah sebesar Rp2,83 Triliun. Untuk kegiatan prioritas dan 086 Triliun Rupiah untuk kegiatan pendukung, untuk rencana penghematan kami melakukan utamanya pada kegiatan pendukung yakni sebesar 78,25% dari total penghematan yang harus dilakukan sebesar Rp157,65 Miliar.

Berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI tanggal 27 Januari 2021, total anggaran KKP Tahun 2021 semula 6,65 Triliun setelah refocusing dan realokasi menjadi 6,49 Triliun dengan rincian sebagaimana pada slide yang ditayangkan. Dengan demikian pagu anggaran KKP Tahun 2021 berdasarkan program setelah refocusing dan realokasi totalnya adalah 6,49 Triliun dengan rincian sebagaimana pada slide yang ditayangkan.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan beberapa update dari perkembangan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto perikanan tumbuh positif pada Triwulan 4 Tahun 2020. Dimana Triwulan 3 lalu berkontraksi sebesar 1,03%. Sektor perikanan pada Triwulan 4 ini tumbuh 106% yang ditopang oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dan permintaan luar negeri.
2. Produksi perikanan Tahun 2020 mencapai 23,16 juta ton dengan nilai 380,61 Triliun. Capaian produksi perikanan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,94% jika dibandingkan dengan produksi perikanan Tahun 2019. Penurunan produksi terjadi pada perikanan budidaya sebesar 5,34%, sedangkan untuk perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 2,26%. Penurunan ini antara lain merupakan dampak pandemi dimana sempat terjadi hambatan dalam penyediaan input sarana produksi karena pembatasan skala besar. Melalui program terobosan KKP akan menggenjot produksi udang, lele, nila, patin, kerapu, lobster, dan rumput laut melalui pengembangan klaster kawasan budidaya tambak udang dan pengembangan kampung budidaya.

3. Total ekspor Tahun 2020 mencapai 5,2 Miliar atau 72,8 Triliun. Dimana 4,84 Miliar Dollar adalah ikan konsumsi melalui program terobosan. KKP akan menaikkan volume ekspor dari komoditas udang sebesar 250% yakni dari 208.000 ton pada Tahun 2020 menjadi 727.000 ton pada Tahun 2024 terutama ke pasar Amerika Serikat dan China.
4. Berikut kami sampaikan 5 pasar utama ekspor hasil perikanan yaitu Tiongkok, Asean, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Secara nilai tertinggi adalah ke Negara Amerika Serikat, selanjutnya Tiongkok, Asean, Jepang, dan Uni Eropa.
5. Sedangkan slide berikut adalah menggambarkan komoditas ekspor. Dilihat dari volume dan nilainya. Dimana udang merupakan komoditas andalan utama Indonesia baik dari sisi volume maupun nilai. Capaian angka konsumsi khusus ikan nasional pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 56,39 kg per kapita atau naik sebesar 3,47% dibandingkan Tahun 2019 sebesar 54,5 kg per kapita. Nilai tukar pada Januari 2021 telah menunjukkan peningkatan dan mencapai lebih dari 100, 102,83 untuk nilai tukar nelayan, dan 101,26 untuk nilai tukar pembudidaya ikan. Melalui program gemar ikan yang akan menyerap produk perikanan local maka nilai tukar diharapkan akan mencapai target Tahun 2021 sebesar 103 atau bahkan melebihi target. Dalam kurun waktu Oktober 2019 sampai dengan Februari 2021, KKP terus melakukan operasi pemberantasan illegal fishing, terdapat tambahan 9 kapal hasil tangkapan. Sehingga total menjadi 109 unit kapal yang ditangkap.

Dari sisi akses terhadap modal usaha. Sebagaimana telah kami laporkan pada Raker yang lalu, realisasi kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan Tahun 2020 telah mencapai 5,26 Triliun yang disalurkan kepada 173.355 debitur dengan NPL hanya 0,07%. Ini merupakan kinerja yang baik selama Januari 2021, kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan telah terealisasi sebesar 365,1 Miliar untuk debitur atau 11,06% dari target 2021 dalam RPJMN sebesar 3,3 Triliun.

Kemudian untuk realisasi penyaluran dana kelolaan Badan Layanan Umum Lembaga Modal Usaha Kelautan dan Perikanan selama Tahun 2020 sebesar 295,89 Miliar kepada 5.469 pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sedangkan untuk realisasi penyaluran dana kelolaan BLU di Januari 2021 sebesar 28,49 Miliar kepada 407 pelaku usaha.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat tanggal 4 Februari yang lalu, kami laporkan bahwa selama 2 hari ini KKP telah melakukan sosialisasi bantuan Pemerintah Tahun 2021 bersama dengan para tenaga ahli, Bapak/Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yaitu Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Penguatan Daya Saing, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, dan BKIPM. Sementara itu sosialisasi dari Dirjen Perikanan Budidaya dan BRSDM akan diselenggarakan selama 2 hari mulai besok hari Rabu di

Bogor. Kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memastikan para tenaga ahli dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja kali ini. Kami mohon persetujuan lebih lanjut dari Komisi IV DPR RI terhadap usulan refocusing dan realokasi anggaran KKP Tahun 2021. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021.

Terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Om Santi Santi Santi Om.

Namo Budhaya.

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Terima kasih Pak Menteri.

Apa yang sudah dipaparkan ada dalam catatan kerja kita masing-masing, dan kita paham Pak Menteri baru ini memasang target yang sangat luar biasa. Target pendapatan yang sangat tinggi dengan pola-pola logika terbalik. Biasa yang dipajakin ijin, hari ini yang dipajakin produksi. Tetapi produksinya tetap mereka yang memiliki tingkat produksi nelayan yang tinggi. Nelayan yang ecek-ecek pendapatannya kecil kan enggak mungkin dipajakin. Harusnya mereka disubsidi termasuk didalamnya saya baca berapa waktu yang lalu tentang dana pension bagi para nelayan. Nelayan, petani itu tidak pernah pensiun, sampai kakek-kakek belum dia meninggal dia terus bekerja itu bedanya.

Nah dan kita yang disini juga tidak mau pension. Pengen terus saja di DPR, terus jadi Menteri, terus jadi Dirjen, pengennya begitu walaupun pusing kalau disuruh pension enggak mau, pusing memang banyak masalah tapi enggak bisa juga meninggalkan itu. Jangan tersenyum begitu dong Pak Johan, kok senyumnya beda. Sudah mau Reses ya besok ya.

Baik, kita mulai dari ahli kelautan kita yang sangat paham dunia laut bahkan sudah menyelam ke dasar laut tetapi tidak bisa menyelam ke dasar hatinya Menteri KKP. Dasar laut dia bisa salami tapi dasar hatinya Menteri KKP dia belum bisa selami sampai realisasi bantuan untuk masyarakat didaerahnya.

Selanjutnya Bapak Abdullah Tuasikal.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati, saya banggakan Pimpinan, rekan-rekan Anggota,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen beserta jajarannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya akan membacakan masukan, pertanyaan dari Fraksi Partai Nasdem. Potensi ekonomi yang luar biasa dari sector kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia tentunya membutuhkan kebijakan dan dukungan anggaran agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjadi salah satu sector memberi kontribusi positif dalam perbaikan ekonomi Indonesia terutama pada masa pandemi COVID-19.

Pada Rapat Kerja ini kami akan mencermati beberapa hal, pertama kami mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan capaian fasilitas pendanaan usaha nelayan, penyaluran dana bergulir LPMUKP serta realisasi KUR, sub sector perikanan pada Tahun 2021, dengan memberi kemudahan bagi para nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar, dan pengelola hasil perikanan dalam mengakses permodalan tersebut.

Terkait dengan ekspor benih lobster yang telah kami sampaikan pada saat Rapat Kerja sebelumnya, kami mengapresiasi KKP yang telah menerbitkan surat penghentian sementara ekspor benih lobster. Kami mendorong agar dilakukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan ekspor tersebut dan lebih mendorong peningkatan budidaya dalam negeri. Disamping itu perlu upaya sarana pengawasan dalam rangka mencegah ekspor benih lobster secara illegal. Kami minta penjelasan KKP, apakah rencana kajian terkait benih lobster dan peningkatan sarana pengawasan dalam rangka mendukung kebijakan penghentian ekspor benih lobster telah masuk dalam rencana anggaran dan kegiatan KKP 2021. Meminta penjelasan terkait dengan perubahan kegiatan pada program KKP dibandingkan dengan usulan saat RDP.

- a. Kegiatan peralatan pembenihan pada program pengelolaan kelautan dan perikanan sebanyak 12 unit dengan anggaran 1,3 Miliar yang semula tidak direncanakan.
- b. Kegiatan kampung perikanan budi daya yang telah mengalami pengurangan dari sebelumnya 7 unit menjadi 6 unit.

Untuk itu kami dari Partai NasDem mengapresiasi apa yang menjadi perencanaan dari KKP. Dan saya mau sampaikan kepada Pak Menteri dan lebih khusus lagi kepada Pak Dirjen Tangkap bahwa pada tanggal 22 hari Kamis bulan November Tahun 2020, saya beserta kami beserta Kepala Kepelabuhanan Pak Pritze Liz Nusa. Kebetulan Beliau juga dari Ambon. Beliau ke tempat jembatan perikanan di undang oleh masyarakat. Kita adakan pertemuan dan kegiatan ini karena jembatannya ini ada bencana

alam yang merusak jembatan sekaligus tempat penjualan ikan, tapi tempat penjualan ikan sudah dibangun sama Pemerintah Provinsi. Tapi jembatannya yang belum. Jembatan ini, ini adalah jembatan local. Jembatan tradisional yang dipakai oleh masyarakat. Jadi kalau ini tidak dibangun saya kira juga ini tidak benar. Saya kira Dirjen Perikanan juga harus jeli soal perencanaan, melihat mana skala prioritas dan mana tidak prioritas. Saya kira bencana alam itu adalah suatu yang prioritas.

Yang kedua, saya kira Pak Dirjen Perikanan ini karena baru, Pak Menteri juga karena baru. Ada sesuatu yang sebenarnya sangat prinsip, sesuatu yang sangat prinsip. Ini menyangkut masalah Peraturan Menteri Nomor 26 Perment Tahun 2014 tentang, Kita ingat bahwa kalau ada ijin kapal yang kita lihat kalau ada sekitar kurang lebih 4 ribu sekian ijin kapal. Ada 1500, 1500. Mereka adakan penangkapan harus dirumpon.

Saya mau tanya, apakah rumpon yang ada ini legal atau tidak legal? Rumpon yang ada ini ditagih pajak atau tidak. Kalau setahu saya rumpon yang ada di seluruh Indonesia itu adalah saya dengan Pak Menteri, berapa bulan yang lalu dari awal saya sudah teriak soal yang namanya rumpon. Kalau tidak ada rumpon itu tidak bisa. Dia tidak bisa melaut. Kalau Pak Dirjen biarkan melaut ini yang terlarang. Bagaimana caranya terlarang.

Saya minta dari penjelasan Pak Dirjen, dan pada saat RDP yang lalu itu Pak Menteri sudah katakan bahwa untuk rumpon dengan Peraturan Menteri Nomor 26 itu nanti ada harmonisasi. Dan juga terkait dengan moratory yang ada di Banda. Itu juga ada harmonisasi.

Saya mau ingatkan saja karena setiap pertemuan kita itu lalu berakhir dengan penjelasan yang lain-lain itu lalu kita lupa semua. Padahal tidak akan mungkin Pak. Tidak akan mungkin pengambilan ikan oleh kapal jaring itu pada wilayah-wilayah yang belum ada rumpon. Untuk itu saya minta penjelasannya, apakah rumpon itu sampai di mana. Memang kalau itu juga mudah-mudahan saya salah tapi kalau tidak salah saya harap ada 1 regulasi. Karena apa? Yang takut aturan itu adalah masyarakat yang masih ada di Pedesaan. Sedangkan masyarakat, sedangkan pengusaha-pengusaha besar itu dilindungi. Kasihan negara. Kasihan negara kita ini. Kita mau ada pendapatan, tapi nyatanya tidak. Bagaimana kontribusi untuk negara kalau kerja Kementerian nah seperti ini.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak?

F-NasDem (H. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Jadi saya terus terang saja Pak, saya sudah cerita sudah lama. Tapi akhirnya saya diam karena Menterinya sudah janjikan ada harmonisasi. Saya Cuma ingatkan saja Pak Menteri. Saya salut Pak Menteri akan menyelesaikan semua karena Pak Menteri ini adalah seorang pengusaha,

dan saya kira matematika juga tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harapkan akan terwujud semua.

Saya kira demikian Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Menteri sudah memulai jadi Menteri dengan 2 hal. Meningkatkan pendapatan tanpa menghancurkan konservasi. Menghentikan ekspor benih lobster, kemudian membuat kerangka acuan untuk PNBP produksi perikanan kelautan. Itu kan salah satu gagasan cerdas. Tinggal di tindak lanjuti oleh seluruh kelengkapan yang dimilikinya karena gagasan harus ada perangkat teknis yang melengkapinya. Dan ada pakar di bidang ini. Kalau ngomong itu tenang, pelan, lembut tapi menggelegar. Karenanya namanya juga Edward. Pak Edward duduknya selalu sebelah sana, saya enggak ngerti ada blok barat ada blok timur.

Silakan.

F-PKB (EDWARD TANUR, S.H.):

Terima kasih.

Pimpinan Komisi IV beserta Anggota,
Bapak Menteri bersama jajarannya,

Jadi saya langsung to the point saja. Karena terlalu banyak nanti lupa materinya. Jadi begini Pak, saya ini ada pandangan atau masukan dari PKB saya persingkat saja. Jadi program Pak Menteri dengan melihat refocusing segalanya. Kami Fraksi PKB memahami kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh Kementerian KKP. Yang perlu kami sampaikan bahwa saya melihat disini ada tambahan kapal tangkap. Ini kan kita ngomong peningkatan produksi. Jadi program ini sudah cocok. Tambah lagi mau budidaya ikan air tawar. Ini cocok semua.

Jadi ada daerah-daerah yang jauh dari laut, daerah-daerah pegunungan mungkin ikan tangkap ini solusi. Sehingga semua orang bisa mengenal makan ikan yaitu gemar ikan, cocok jadi sinkron. Cuma yang perlu saya tekankan disini bahwa realisasi bantuan ini semua saya kira harus berjalan tepat waktu. Jangan sampai orang sudah lupa baru bantuannya turun. Karena pandemi COVID ini saya sering sampaikan, bantuan ini bukan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Ini bantuan modal kerja, melatih kamu itu supaya berwirausaha. Jangan kasih bantuan makan kasih habis minta lagi. Kerjanya minta melulu. Kita DPR RI ini juga wakil rakyat juga pusing Pak. Jadi dulu mengeluh bantuan enggak ada. Sekarang bantuan sudah berlimpah-limpah, dari enggak ada dikasih. Jadi ini hanya curhat saja. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa sukses karena ini semua sudah ada dalam catatan, nanti saya serahkan saja supaya mempersingkat waktu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya memasuki Komisi IV ini menjadi Anggota DPR RI sudah dalam satu periode anggaran itu sudah ada 2 kali refofusing. Dan refofusing itu artinya rencana komisi yang bikin pusing, atau refofusing bisa (rencana pokok yang bikin pusing). Ini Dirjennya sudah pusing mikirin anggaran kemarin masih kurang sampai pada rambutnya lihat pada copot itu. Pusing. Dicabut anggaran kecil, besok dicabut lagi.

Nah selanjutnya agar tidak pusing ini yang selalu dihindari oleh nelayan. Nelayan itu sangat takut kalau mendengar suara ini. Suara Guntur.

Dipersilakan.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan semua Anggota,
Yang saya hormati Bapak Menteri dengan segenap jajarannya.

Kami akan menyampaikan pendapat dan saran dari Fraksi Demokrat. Pagu anggaran yang ada pada Kementerian sekarang ini 6,49 Triliun karena adanya penghematan. Kami sangat memprihatinkan dengan kondisi yang ada ini karena memang kita ini 2/3 wilayah kita adalah lautan. Setelah saya baca suatu artikel bahwa biaya pengamanan lautan Indonesia 2/3 ini saja menyangkut 5,9 Triliun. Ini biaya pengamanan wilayah maritime di Indonesia yang dicuri dari hasil itu adalah 25,6 Triliun. Bagaimana saya tidak melihat keprihatinan Bapak dengan anggaran 6,49 Triliun untuk mendukung apa yang saya baca itu saja untuk pengamanan sudah sangat berat, apalagi sekarang anggarannya pengamanan kalau tidak salah hanya 1,5 Triliun. Ini masalah-masalah yang harus kita hadapi bersama. Negara ini adalah negara maritime. Dan dunia sangat menghargai akan kelebihan Indonesia itu. Itu yang pertama. Sehingga apa pun juga masalah-masalah kelautan sangat strategis bagi Indonesia kedepan. Saya sangat berharap keseriusan Bapak dengan gagasan-gagasan yang tadi bagus.

Yang kedua, dalam klaster kemiskinan ini generasi muda juga surut Pak. Generasi muda sekarang ini hanya 51% hilang untuk cinta kepada perlautan, nelayan ini. 50% hilang. Ini kiranya Bapak bisa lebih menstimuluskan bagaimana meningkatkan gairah-gairah para pemuda ini untuk kembali melalui bidang pendidikan nelayan untuk terjun kembali sebagai seorang nelayan yang baik.

Yang ketiga, untuk merupakan komoditas udang sebagai unggulan kita. Bapak menyampaikan pada Tahun '24 nanti akan mencapai 250% eksportnya. Salut. Namun saya ingin mendapat bagaimana strategi KKP dalam mencapai target tersebut.

Yang keempat, tadi sudah saya sampaikan anggaran pengamanannya sangat kecil 1,4 Triliun didalam masalah-masalah pengamanan ini ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada dan lain sebagainya, sebagaimana Bapak sampaikan tadi kiranya juga bisa lebih meningkatkan peranan PSDKP dilapangan ini.

Yang kelima yang terakhir, tentang disvarietas tingkat konsumsi ikan. Tingkat konsumsi ikan nasional mencapai level 54,49 kilogram per kapita. Tetapi di Pulau Jawa ini baru 36,37 kilogram. Sangat aneh dan kontradiktif. Saya kembali ingatkan Bapak bahwa 2/3 wilayah kita ini adalah lautan. Kita sudah merdeka 75 tahun. Saya kalau turun menyampaikan program Bapak, "gemar makan ikan" kadang-kadang saya malu juga menyampaikan kebodohan bangsa ini. 2/3 lautan 75% hasilnya seperti itu. Tetapi kita baru mempromosikan "gemar makan ikan" padahal ikan sumber protein kita semuanya. Jawa Timur 36 Daerah Tingkat II, 12 stanting. Inilah kondisi-kondisi yang kita terlambat mengantisipasi akan kekayaan ikan kita. Kadang-kadang saya malu untuk bicara seperti ini tetapi mari kita kembali ... kepada hal-hal yang harusnya bisa memakmurkan bangsa tetapi baru sekarang kita bangun dari suatu kebodohan.

Maaf tadi ada 1 lagi.

KETUA RAPAT:

Yang tadi sudah terakhir loh Pak.

F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.):

Sedikit lagi Pak. Yang sangat terakhir ini Pak, terima kasih atas bantuan-bantuan yang sudah disampaikan kemarin. Hanya yang sudah kembali dijanjikan tahu-tahu belum diberikan padahal sebagian sudah diberikan, ini menimbulkan hal-hal yang kiranya saran kami tetap seperti yang lalu, ini bisa ditindaklanjuti untuk pada Tahun yang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak Guntur.

Mengenai konsumsi ikan berdasarkan data tolong dilihat, apakah konsumsi itu hanya didasarkan data ikan laut atau dengan air tawar. Karena di beberapa riset saya temukan ada masyarakat yang memang setiap hari

hidupnya di ikan air tawar tetapi konsumsi makan ikannya dianggap rendah. Padahal konsumsi setiap hari ikan. Ini yang harus dilihat. Orang Jawa Barat itu kebanyakan enggak suka laut tapi sukanya pindang sama ikan asin. Sehingga saya minta kepada Kementerian KKP problem ikan pindang itu Cuma 1, makan ikan pindangnya enak dipiring tapi kalau lihat pengrajinnya mungkin kita enggak mau makan lagi. Rata-rata jorok.

Nah itu yang segera harus dibenahi. Pengrajin ikan pindang itu kegemaran orang sunda makan ikan pindang sama Pete Pak, wah sudah itu. Biar enggak bau makan jengkol. Nah komitmen terhadap penjagaan laut berarti komitmen terhadap penjagaan laut berarti komitmen terhadap penjaga Ibu Pertiwi. Kita sepakat Presiden siapa pun dari kelompok mana pun, dari partai apa pun. Ibu Pertiwi enggak mungkin diganti dengan Umi Pertiwi atau Emak Pertiwi, tetap Ibu Pertiwi. Dan yang tetap menjadi Emak dan Ummi biarkan Bu Ema Ummyatul yang selalu ditunggu ucapannya dan dirindukan oleh banyak orang.

Terima kasih.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati,
Bapak Menteri, Bapak Dirjen, beserta Bapak/Ibu jajaran dari Kementerian KKP,

Kami dari Fraksi Persatuan Pembangunan akan memberikan beberapa hal terkait dengan saran dan pertanyaan yang kami sampaikan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai sektor kelautan dan perikanan di masa pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi keberlangsungan aktivitas produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, rantai pasokan komoditas perikanan.

Terjadi penurunan permintaan ekspor di Indonesia sebesar 10 sampai 20 persen. Kondisi ini disebabkan banyak restoran tutup dan kebijakan pembatasan ekspor diberbagai negara, seperti di Amerika Serikat dan Tiongkok. Nelayan dan pembudidaya ikan di beberapa daerah mengalami kesulitan dalam menjaja ikan dan mendapatkan harga yang pantas menjadi catatan penting oleh Fraksi PPP untuk menjadi perhatian serius bagi Pemerintah. Kebutuhan dalam sarana produksi juga menjadi permasalahan pada masa pandemi ini. Harga pakan dan obat-obatan, terutama yang mengandung bahan impor mengalami kenaikan.

Untuk mencegah membengkaknya biaya produksi pembudidaya melakukan panen lebih awal. Menurut Fraksi PPP pandemi COVID-19 juga

telah menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan keberlanjutan masyarakat di sector kelautan dan perikanan. Fraksi PPP mendorong penguatan anggaran diseluruh Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingat program dan kegiatan di Kementerian KKP merupakan ujung tombak ketahanan pangan andalan atau unggulan di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Saran dan pertanyaan kami,

1. Sebanyak 26.675 rumah tangga perikanan terdampak COVID-19, baik karena harga ikan yang anjlok maupun pemasaran untuk ekspor yang tertutup. Selain itu kebijakan penutupan beberapa daerah juga mempengaruhi penyerapan hasil produksi perikanan pada nelayan. Kami meminta KKP lebih gencar melakukan pelatihan bidang pengolahan, pengawetan, pengemasan untuk meningkatkan umur simpan produk perikanan seiring dengan menurunnya nilai ekspor di Luar Negeri.
2. Kami juga menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guntur, memperluas program gemar ikan ini memang sangat penting. Memang di Dapil kami tidak ada laut Pak. Masyarakat kita juga diberi program gemar ikan sangat luar biasa untuk menekan angka stunting di Jawa Timur bertepatan Dapil kami di Jawa Timur VIII. Yang sama-sama kami juga mengkampanyekan program KKP ini yang luar biasa. Kami mohon untuk kedepan ini bisa ditambah untuk program gemar ikannya.
3. Terkait dengan program yang kemarin diberikan, di 2020 ada pakan ikan. Yang mana pakannya sudah datang Pak tapi ikannya belum, dan ini kami mohon pakannya ini ... pasti akan rusak. Kalau 2021 ikannya datang tapi pakannya sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi mohon ini dievaluasi apakah ini diganti atau bagaimana Pak ini untuk Dapil kami kemarin pakannya sudah datang banyak tapi ikannya tidak datang. Jadi tidak ada yang makan pakan itu Pak. Jadi mohon nanti untuk dievaluasi program tersebut.
4. Meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menyelesaikan peraturan atau juglak- jugnis program kegiatan di Tahun 2021 yang belum selesai dengan memperhatikan pada kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar, kelompok petambak garam, social keagamaan yaitu Pondok Pesantren (mohon juga diperhatikan Pak Menteri) karena di Pesantren ini juga banyak yang mengelola bio flog atau perikanan sehingga Pondok Pesantren harusnya berhak juga menerima program dari KKP berupa blue flog perikanan yang itu pun juga sesuai dengan verifikasi dari pihak Kementerian juga Ormas Kepemudaan, dan atau pun kelompok pemuda dan lain-lain. Selanjutnya segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat kelautan perikanan secara luas agar bantuan Pemerintah dapat dengan cepat dipublikasi dan divalidasi, dan diakses diawal tahun ini sehingga tidak terjadi seperti kemarin.

Kami mohon dan Inshaa Allah tadi sudah disampaikan besok TA-TA kami akan koordinasi untuk juklak juknisnya dan segera ditindaklanjuti. Semoga program ini bisa realisasi Pak Menteri. Kami mohon harapan seperti itu dan tidak ada php lagi seperti kemarin.

Terima kasih.

Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf.

Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, ini yang selalu kritis tapi kelihatan marah tapi sebenarnya hatinya lembut Pak TA Khalid.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Pimpinan, beserta seluruh Anggota Dewan Komisi IV yang kami banggakan,

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang kami hormati.

Langsung saja. Memang kalau Pak Dedi tadi menyampaikan refocusing rencana membuat kita pusing, tapi faktanya memang kita tidak bisa pungkiri. Dimana hari ini senang atau tidak kita harus menerima penghematan atau pemangkasan anggaran lagi kepada KKP. Walaupun hanya 157 Miliar, tapi 157 Miliar dari pagu 6,65 Miliar. Kecil KKP dipotong, tapi anggarannya juga kecil.

Bayangkan teman-teman sekalian. Kita ini yang harus mengamankan laut, mensejahterakan masyarakat nelayan di pinggir laut. Anggaran Kementerian KKP Cuma 0,9% dari APBN. Namun karena kondisi kita lagi begini, kita enggak boleh pesimis Pak Menteri dan teman-teman sekalian. Bagaimana mengoptimalkan anggaran yang 0,9% dari APBN harus dapat kita amankan laut kita, harus kita mampu mempercayakan masyarakat nelayan kita maka oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal,

1. Partai Gerindra menyarankan kepada KKP untuk mempertimbangkan adanya anggaran tambahan sehingga diharapkan tidak akan terlalu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat disektor kelautan dan perikanan terutama anggaran padat karya yang berdampak langsung kepada nelayan, pembudidaya ikan, pemasar, dan pengolahan hasil perikanan. Mengingat dimasa pandemi yang mungkin tidak tahu kapan kita akan berakhir masyarakat khususnya nelayan sangat membutuhkan stimulus melalui program-program Pemerintah agar dapat menjaga produktivitas sekaligus mengurangi dampak ekonomi.

2. Fraksi Gerindra juga menyampaikan tentang keluhan yang sering kali disampaikan oleh para nelayan. Kita khususnya nelayan pesisir adalah kecukupan pasokan BBM, dan mereka juga berharap kepada Pemerintah agar adanya subsidi BBM khusus untuk nelayan seperti subsidi yang diberikan Pemerintah kepada para petani seperti pupuk. Tapi Fraksi Gerindra mengusulkan agar adanya anggaran subsidi BBM bagi para nelayan kecil dengan mekanisme penyaluran bantuan subsidi BBM yang efektif, tepat sasaran dengan pengawasan yang ketat.
3. Kami dari Fraksi Gerindra juga meminta melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memiliki salah satu program prioritas yaitu membuat percontohan model klaster tambak udang berkelanjutan untuk mencapai target peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250% hingga Tahun 2004. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pada Tahun 2020 program klaster tambak udang ini telah disebar di 5 lokasi yaitu Kabupaten Aceh Timur, Lampung Selatan, Cianjur Jawa Barat, Kabupaten Bowal, kemudian Sukamara Kalimantan Tengah, maka Fraksi Gerindra meminta agar KKP terus memberikan pendampingan teknis guna keberhasilan dari program tersebut. Keberhasilan program ini sangat penting, karena disamping mengejar target produksi juga diharapkan menjadi rintisan dalam pengembangan budidaya udang nasional dan menjadi magnet agar masyarakat kembali antusias membudidayakan udang. Semua kebijakan dan program KPH haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Jangan sampai kenaikan jumlah ekspor perikanan dan meningkatkan konsumsi ikan nasional tidak dirasakan oleh nelayan dan pembudidaya ikan. Fraksi Gerindra menanyakan berapa target nilai tukar pembudidaya ikan pada Tahun 2021.
4. Fraksi Gerindra juga meminta untuk mendorong realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan. Karena per Januari 2001 baru sebesar 365 Miliar untuk 10.213 debitur atau 11% dari target 2021 yaitu 3,3 Triliun. Realisasi terbesar usaha budidaya sebesar 140 sekian (saya bacakan diatas tadi) pengelolaan dan pemasaran sebesar 127 Miliar untuk 3.877 debitur dan penangkapan sebesar 71,9 Miiliar untuk 2.273 debitur. Faktanya saat ini masih banyak pelaku kelautan perikanan yang kesulitan dalam mengakses bantuan modal tersebut. Maka ini harus ada optimalisasi dari BLU agar ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya dan dapat kita bantu masyarakat nelayan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Khalid ada lagi?

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Pak Ketua,

Karena ini kan saya harus baca teman-teman Fraksi.

KETUA RAPAT:

Pembacaan dari staf ahli ya?

Lanjut.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

5. Terakhir, saat ini memang sebagian besar usaha perikanan belum dikelola dengan penerapan sistem manajemen rantai pasok terpadu yang meliputi *sustainable* produksi, industri pasca panen, dan pemasaran. Sehingga kurangnya atau tidak pastinya kepastian harga jual, pasokan dan harga kurang yang stabil, dan resiko usaha menjadi tinggi. Kami dari Fraksi Gerindra mendorong KKP untuk membuat sebuah sistem baru untuk mengintegrasikan semua proses tersebut guna meningkatkan kualitas hasil perikanan secara nasional.

Mengingat waktu (tadi sudah dapat teguran dari Pimpinan). Mungkin sebagian ada yang tidak kami baca. Mohon mendapat jawaban dari KKP.

Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami dari Fraksi Gerindra menyadari memang anggaran KKP hanya 0,9% dari APBN dengan beban tanggung jawab yang luar biasa tapi bagaimana upaya kita bersama agar *Insha Allah* dengan dana yang kecil pun kita bisa membangun negeri ini.
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Pak TA Khalid menggebu-gebu.

Selanjutnya Pak Slamet Fraksi PKS.
Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Dewan, Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri KKP beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Langsung saja beberapa hal yang ingin disampaikan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya bacakan Pak, yang pertama yaitu ijin kami dari Fraksi PKS untuk memberikan pendalaman terkait jawaban yang sudah disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, baik jawaban terkait

saat Rapat Kerja maupun jawaban pendapat Fraksi yang disampaikan secara tertulis oleh seluruh Fraksi di Komisi IV.

1. Dalam jawaban tertulis, yang kami terima terkait rendahnya serapan anggaran Dirjen Perikanan Budidaya Tahun 2020. Ada beberapa hal yang kami garisbawahi,
 - 1) IPA ABT yang baru terbit bulan Agustus 2020 terdapat 3 gagal lelang untuk bantuan alat penangkapan ikan, adanya pandemi COVID-19 yang menghambat proses distribusi.

Kami mengingatkan kepada Pak Menteri KKP bahwa Tahun 2021 ini masalahnya akan sama sehingga kami berharap Pak Menteri sudah menyediakan strategi untuk menghindari hal yang sama akan terjadi di Tahun 2020.

2. Kami juga belum mendapatkan jawaban tertulis terkait kegiatan penyusunan NSPK dan beberapa rekomendasi kebijakan perikanan, misalnya Dirjen Perikanan Budidaya 27,3 Miliar, dan berikutnya Dirjen yang lain.
3. Terkait target capaian KKP 2019 dan 2024 yang terkoreksi atau dikoreksi sesuai dengan target Menteri baru ataupun hal lain sebagaimana perlu dikordinasikan dengan Komisi IV agar Kementerian KKP dan Komisi IV tetap 1 frame khususnya dalam proses pengawasan. Sebagai contoh perubahan target NTN dan NTPI pada Tahun 2020 yang Fraksi PKS pertanyakan, ternyata dalam jawaban tertulis yang kami terima terdapat koreksi nilai target NTN untuk Tahun 2020 yang kami belum ketahui ada perubahannya.
4. Dalam jawaban tertulis yang kami serahkan saat Rapat Kerja lalu ada pertanyaan kami yang belum sempat terjawab oleh KKP yaitu mengenai konsep kampung perikanan yang sudah digulirkan dalam proses refocusing. Jadi waktu itu kita minta konsepnya kayak apa. Itu yang belum dijelaskan juga. Waktu itu Pak Ketua kalau enggak salah juga minta hal yang sama.
5. Fraksi PKS memberikan perhatian secara serius terhadap sector perikanan. Kami mempertanyakan langsung ke Menteri Kelautan dan Perikanan bagaimana strategi Menteri agar membawa sector perikanan ini paling tidak mengalahkan Vietnam dari ekspor perikanan. Bagi kami sangat sedih melihat kenyataan Vietnam bisa menjadi 3 besar negara dengan nilai ekspor perikanan terbesar di dunia.
6. F-PKS juga belum mendapatkan jawaban tertulis terkait dengan perubahan skema perijinan sector kelautan dan perikanan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Demikian Pak Ketua yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih Pak Slamet yang tepat waktu.

Selanjutnya Kang Haerudin, fokus pada pertanyaan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Anggota, Pak Menteri KKP, beserta
Seluruh jajaran yang saya hormati.

Tentu kita sadari betul bahwa potensi perikanan kita Pak Menteri mudah-mudahan ini menjadi modal besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat kita. Dimana Kementerian KKP ini adalah bagian dari benteng pertahanan pangan bagi bangsa kita. Mudah-mudahan produktivitas perikanan kita kedepan lebih meningkat.

Yang ingin saya sampaikan beberapa hal dari pernyataan sikap dari Fraksi PAN untuk menyikapi berapa perkembangan saat ini. Pertama Pak Menteri, bagaimana kita dari anggaran yang terbatas secara strategis mampu didorong pada hal-hal yang strategis untuk membangun pertahanan pangan. Itu yang terpenting. Tentu diurai dengan beberapa hal.

Yang kedua, karena bagian benteng pertahanan kita itu adalah salah satu adalah budidaya ikan kita Memang produksi ikan baik yang tangkap maupun yang budidaya untuk naik itu susah, bertahan pun susah. Apalagi kondisi modal kita yang sangat terbatas tetapi harus dimaksimalkan dalam konteks bagaimana budidaya ikan itu. Saya ingin sampaikan seperti contoh, hari ini budaya ikan yang harganya tinggi itu malah ikan hias. Dan itu menambah produktivitas para budidaya ikan, dan kemampuan budidaya juga memang harus ditingkatkan. Dan ini juga sekaligus mengingatkan Bapak Dirjen Budidaya yang memang tahun kemarin kita banyak yang gagal yang tentunya keruh suasana kebatinan kita juga. Mudah-mudahan, bukan hanya diganti tapi ditambah memang. Harus hal-hal yang dulu, yang lalu-lalu kita jawab dengan baik, ke depan kita jalani dengan baik.

Yang ketiga Pak Menteri urusan pergaraman kita. Garam kita itu impornya masih tinggi, produktivitas garam di masyarakat kita juga masih terbatas. Harusnya didorong baik-baik, saya yakin garam kita juga sama kualitasnya dengan garam luar negeri. Tapi memang saya juga paham, tentunya kita juga paham. Para gajah berkeliling ingin mengangkut garam dari negeri asing juga bukan sedikit, dan itulah pertarungan dan perjuangan Pak Menteri beserta jajarannya di KKP. Bagaimana petani garam kita justru didorong dan bisa maju kedepannya.

Yang selanjutnya dari Fraksi PAN adalah tentang ikan asin Pak Menteri. Di pasar tradisional kita justru ikan asing yang impor itu sangat banyak. Malah produksi lokalnya jarang, ikan asin produksi lokal kita itu. Kenapa bisa begitu, kita ikan asin didominasi dari Thailand, Vietnam, Taiwan, Myanmar, karena memang bahkan ada tapi mudah-mudahan salah. Kita

ikannya diekspor bahan bakunya, kita buat ikan asin dan kita ekspor. Apa kita impor bahan bakunya, dan kita ekspor setelah jadi asin. Jadi kita hanya jadi buruh pengasin doang. Nah kira-kira masa bangsa kita yang arsipilago begini besar, samudernya yang begini besar, masa ukuran ikan asin kita masih impor. Ini tentu dari Fraksi PAN mengingatkan kita semua agar kita memahami dan berjuang sekeras mungkin, semaksimal mungkin agar para petani kita para pembudi daya ikan kita mendapatkan kemajuan.

Dua hal lagi yang ingin kami sampaikan termasuk dalam konteks ikan tangkap. Dirjen Tangkap kedepan mengurai setiap Dapil kita tidak semua dengan kapal besar. Ada Dapil kita yang tidak hanya perahu, atau kapal 5GT, 3GT, saya tidak punya landasan tidak punya tempat bersandar. Yang masuk masih katinting. Nah ini juga harus dipikirkan karena nelayan kita tetap harus punya akses terhadap bantuan-bantuan kita.

Yang terakhir tentang mangrove. Karena laut kita banyak yang rusak oleh sampah. Laut kita yang banyak tidak bisa berlindung ikan-ikan maka menggalakan penanaman mangrove itu adalah sebuah keniscayaan, bagaimana juga bisa membersihkan laut sekaligus juga menghijaukan laut. Dimana ikan-ikan kita berlindung dan mereka bisa. Tangkapan para nelayan kita kedepan akan lebih baik.

Terima kasih Pak Menteri.

Terima kasih Pimpinan.

Demikian pernyataan, sikap dan penegasan dari Fraksi PAN untuk kemajuan kita semua di KKP.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Sutrisno.

Fokus Pak apa yang menjadi kendala.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan para Anggota, Pak Menteri beserta jajaran.

Saya ditugaskan mewakili Fraksi PDI-Perjuangan. Fraksi PDI-Perjuangan berapa besaran anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang akan disoroti adalah

bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada untuk dapat membuka ruang kehidupan bagi rakyat dan berapa sumbangsuhnya bagi kemajuan bangsa. Tadi Pak Menteri menyajikan tentang produk domestik bruto.

Saya mencoba membandingkan dengan pertanian. Kelautan dan perikanan di Tahun 2019 sumbangsih pada kemajuan bangsa 5,5% dari produk domestik bruto. Sector pertanian 4,23. Di era COVID ini Desember 2020 tadi disebutkan sector kelautan dan perikanan hanya tumbuh 1.06 sedangkan pertanian tumbuh 3,65%. Ini persoalan. Kalau kita bandingkan, kalau pertanian produksinya dari A sampai Z dilakukan. Kalau sector kelautan dan perikanan tinggal nangkap. Karena sudah ada dilautan. 2/3 wilayah kita adalah wilayah laut. Pada posisi ini tentunya mudah-mudahan sepakat dengan saya Pak Menteri, ada persoalan yang harus dibenahi oleh Pak Menteri dalam manajemen pengelolaan indicator kelautan dan perikanan. Saya yakin Bapak ahli manajemen yang tentunya juga perlu ada kejutan baru didalam mengelola sektor ini.

Kemudian yang kedua, kebijakan APBN. Di 2021 tetap konsentrasinya menjadikan ABBN sebagai instrument dalam penanganan dampak COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Tentunya dalam kita menganggarkan Tahun 2021 memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di Tahun 2020. Di Tahun 2020=26.675 rumah tangga perikanan terdampak COVID-19. Permasalahannya karena pasokan hasil produksi perikanan menurun, dan harganya menurun. Akibat apa? Akibat proses penanganan covid, membatasi ruang gerak manusia. Akibatnya rumah-rumah makan tutup dan ekspor pun juga berkurang.

Yang kedua persoalannya adalah harga pakan dan obat-obatan khususnya yang menggunakan bahan dari impor itu harganya tinggi. Fraksi PDI-Perjuangan berkehendak tentunya persoalan ini harus dijawab di APBN 2021 yaitu oleh tentunya karena karakter masyarakat itu dibatasi maka produksinya harus menyesuaikan dengan karakter konsumen. Dengan tentunya mengolah hasil produksi menjadi barang jadi supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya apa, programnya tentunya dengan meningkatkan UMKM. Ini tidak Nampak didalam program yang ada di Kementerian. Dengan memfasilitasi sarana produksi tentunya modalnya adalah dari KUR tadi. Jadi anggaran terbatas tapi bisa disupport dengan KUR.

Kemudian Dirjen Perikanan Budidaya, dengan harga pakan yang meningkat tentunya bagaimana Dirjen Budidaya mendorong petani ikan budidaya untuk mampu memproduksi pakan local dengan memanfaatkan bahan baku local. Formatnya sama seperti tadi. Alat-alat dibantu oleh perikanan budidaya, modal dari KUR.

Saya kira itu yang penting yang kami soroti. Karena apa, akhirnya untuk menghilangkan kesan. Jangan kemudian Kementerian hanya utak atik anggaran, bagi-bagi anggaran. Kami ingin tahu jelas konkritnya kayak apa programnya, dan berapa sumbangsuhnya bagi kemajuan bangsa, berapa sumbangsuhnya dalam membuka ruang kehidupan buat rakyat.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Mbak Alien Mus.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV, Bapak/Ibu Komisi IV, dan juga Bapak Menteri, Bapak Sekjen beserta jajaran Eselon I dari KKP yang saya hormati. Dan Inshaa Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Aamiin.

Jadi Pak Menteri, tentunya ini adalah proses pendalaman dari Raker kita kemarin. Saya ingin menyampaikan bahwa di Kepulauan Riau juga itu harus menjadi atensi dari KKP, baik dari sarana-prasarana, baik juga dalam nelayannya, terus juga industrinya. Selain dari itu, saya ingin menyampaikan Pak Menteri, kemarin kalau enggak salah Bapak pergi ke Provinsi Maluku. Kunjungan Bapak disana kami juga membaca satu berita bahwa Bapak atensi sekali kepada para nelayan. Berarti dengan memberikan bantuan untuk asuransi nelayan.

Yang ingin saya pertanyakan adalah bahwa klasifikasi nelayan itu umurnya seperti apa? Terus asuransi yang diberikan ini misalkan ini diberikan kepada nelayan yang dikeluarkan ijinnya oleh Tingkat Kabupatenkah, Provinsikah, atau dari Pusat? Kemudian saya ingin menanyakan juga Pak, kalau kita mau mengajak investor berinvestasi di daerah kita misalkan di Provinsi berarti sarana dan prasarana, fasilitasnya pun harus kita jamin. Dan juga Pak, saya ingin menyampaikan bahwa jangan terjadinya tumpang tindih ijin antara Provinsi, Kabupaten, dan juga Pusat. Karena mungkin saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Provinsi berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten dan juga tingkat Pusat. Dan ini sering terjadi permasalahannya Pak.

Kemudian saya ingin menyampaikan pertanyaan yang begitu besar Pak karena memang kemarin saya menanyakan soal mangrove yang tumpang tindih dengan KLHK. Tadi juga kami sudah menanyakan, berapa sih target sebelum kita rapat bersama dengan KKP kita sudah rapat dengan KLHK. Jadi wilayah-wilayah mana dan berapa luasannya dan pencapaiannya seperti apa, tolong juga dari KKP memberikan laporannya

datanya. Karena dari KLHK tadi juga sudah ada tapi belum jelas. Jangan sampai tumpang tindih.

Kemudian Pak Menteri, saya ingin mempertegas lagi tentang lumbung ikan nasional baik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Terima kasih sekali kalau seandainya Maluku Utara dimasukkan sebagai lumbung ikan nasional bersama dengan Provinsi Maluku. Tapi jangan sampai 2 Provinsi ini berdekatan Pak tapi letak geografisnya berbeda Pak. Pendekatan dari Maluku dan Maluku Utara. Maluku Utara dekat dengan Bitung Sulawesi Utara. Maluku Utara juga dengan Jepang dari Morotai. Maluku Utara juga berbatasan langsung dengan Filipina. Jadi ini harus ada data yang tepat untuk penyusunan strategis lumbung ikan nasional diantara 2 Provinsi tersebut.

Kemudian tentang nelayan SPBBN Pak. Ini juga kita harus lihat nih Pak, bantuan SPBBN yang tadi disampaikan oleh Bapak TA Khalid. Ini memang menjadi masalah di setiap Provinsi Pak. Saya mau sampaikan bahwa yang sering menggunakan SPBBN ini justru kapal-kapal yang besar. Padahal yang seharusnya menggunakan SPBBN itu klasifikasi adalah 10GT atau 5GT kebawah. Ini harus dilihat klasifikasinya. Terus Pelabuhan nelayan Pak, ini juga harus kita lihat karena saya yakin dan percaya hampir diseluruh Indonesia tidak terpenuhinya pelabuhan nelayan bagi kapal nelayan tangkap yang kecil misalkan yang tadi disampaikan oleh Pak Haerudin. Itu betul Pak, itu juga menjadi masalah. Contohnya kami di Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate, ada di Morotai, ada di Halmahera Utara, ada di Halmahera Selatan. Susah Pak. Kalau pelabuhannya yang tinggi-tinggi terus yang 5GT mau sandar kan susah Pak dalam musim ombak misalkan. Saya juga mau menyampaikan ini beberapa aspirasi dari Indonesia Timur khususnya yang selalu mengkonsumsi ikan asap atau ikan asar dari tuna. Itu enak banget tapi memang cara penyimpanannya juga harus kita pikirkan Pak. Tidak lebih dari 2 hari ikan itu pasti rusak.

KETUA RAPAT:

Cukup Mbak Alien?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Sebentar Pak. Ini curhat sedikit Pak. Ini titipan dari Gubernur Papua dan juga dari Gubernur Sulawesi Utara dan Ambon dari PDIP. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ikan ini juga ikan asar ini menjadi masalah penting. Terus disana juga terkenal dengan sambal roa atau ikan julung yang dikeringkan dan diasap terus dibuat sambal. Itu juga menjadi ekspor juga yang banyak dari Sulawesi Utara dan dari Bitung, dan juga Ambon. Ini juga harus menjadi atensi.

Jadi Pak kemarin saya dihubungi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara untuk menyampaikan langsung ke Bapak, bagaimana sih formasi yang mereka sediakan untuk menyambut dari lumbung ikan

nasional. Semoga nanti saya sampaikan dan Bapak bisa, dan Dirjen bisa pelajari.

Terima kasih.

Itu saja yang bisa disampaikan Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mbak Alien ini pandai sekali ngomongnya tetapi tidak pandai membawa ikannya kalau ke Komisi IV.

Selanjutnya Pak Andi Akmal.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih.

Pak Ketua yang saya hormati, dan juga Pimpinan yang lain, Anggota Komisi IV.

Pak Menteri,

Saya perkenalkan Andi Akmal Pasluddin dari PKS. Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II.

Saya pribadi berharap Pak Menteri yang baru ini bisa bersinergi dengan Komisi IV. Karena kita sama-sama punya kepentingan bagaimana supaya sector kelautan dan perikanan ini berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat kita dan tentu untuk devisa negara. Oleh karena itu saya kira Pak Menteri, komunikasi dan sinergi ini kata kuncinya saya kira.

Kemudian kita juga mendukung, ini pendalaman Pak Ketua tentang masalah pemikiran Pak Menteri untuk nelayan, bukan asuransi mungkin Bu Alien tapi pension. Nah ini menarik ini. Kita ingin mendengarkan penjelasan seperti apa sebenarnya pension bagi nelayan ini terutama tentu bagi nelayan kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa nelayan ini sangat sulit menyekolahkan anaknya. Mereka juga ekonominya rendah. Nah dengan pension ini mungkin bisa dijelaskan skimnya seperti apa.

Kemudian yang kedua mengenai masalah PNB. Nah ini saya kira menarik kalau bahwasannya Pak Menteri ini ingin menaikkan PNB sampai 12 Triliun. Berarti otomatis 30% dari PNB ini Pak masuk ke belanja Kementerian. Artinya kan ada potensi untuk menaikkan anggaran di Kementerian KKP. 4 Triliun kalau 30%-nya ya. Ya mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa Pak kira-kira langkah-langkah apa kedepannya ini. Sehingga ini sesuatu yang realistis bukan sekedar janji politik gitu. Nah ini perlu kita tunggu seperti apa dan saya kira pemikiran thinking of the box (berpikir diluar box).

Kemudian yang ketiga Pak Ketua masalah program kemasyarakatan. Saya agak iri melihat Komisi VII Pak Ketua yang membagi-bagi converter mesin kepada nelayan. Setiap nelayan mendapatkan converter. Satu Anggota Dewan itu hampir ribuan 4000 orang. Bayangkan Pak kalau kami ini di Dapil membagi 4000 kepada nelayan luar biasa efeknya.

Nah ini sekarang ini kan bolanya ada di Kementerian ESDM karena dia bagi-bagi. Saya 2 periode di Komisi IV ini Pak Menteri belum pernah melihat program kita yang sedemikian massif untuk nelayan kita. Kalau dari sektor budidaya saya kira sudah kita berikan pakan tadi, kemudian juga bioflog tapi bantuan yang kecil tapi banyak Pak, iya kan. Jadi jangan selama ini periode kemarin ada bantuan untuk rumput laut. Pengelolaan rumput laut mangkrak Pak. 14 Miliar satunya. Di Sulsel itu ada 4 biji itu Pak. Bayangkan ada 70 Miliar berarti mangkrak disana, enggak bisa dipakai. Artinya kedepannya kita berharap program kemasyarakatan itu kecil tapi banyak yang nikmati Pak. Sehingga nama Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dihatinya nelayan itu betul-betul terpatry dengan kuat. Sama dengan Anggota Komisi IV yang sebagai mitranya, kami dikenang juga oleh nelayan sebagai pejuang bagi nelayan kecil kita, pembudidaya ikan dan petambak garam kita.

Saya melihat selama ini belum ada program kita yang fenomenal kepada masyarakat kita. Sederhana sebenarnya seperti kami di Sulsel itu adalah pusatnya rumput laut. Ya mungkin kita bagi-bagikan saja talinya. Tali kalau kita bisa bagi 10/ 10.000 rumah tangga talinya, coba berapa harga talinya enggak seberapa. Tapi efeknya luar biasa Pak. Efeknya luar biasa dirasakan oleh masyarakat kita. Merasa hadir bahwa KKP hadir pada saat kondisi COVID-19 seperti ini. Ini mungkin contoh saja Pak Menteri. Dipikirkan kedepannya, bagaimana program KKP untuk kemasyarakatan ini bisa dirasakan betul oleh masyarakat kita itu. Daripada Bapak bantu 20 gross ton, 10 gross ton. Nanti kita bantu dengan kapal-kapal kecil. Kalau disana namanya sampang. Joloro kalau Bahasa Makasarnya itu Bugisnya. Ini banyak jumlahnya, dan mereka seakan luar biasa. Ya Pak ya?

Yang terahir Pak Ketua, kita ada kabar gembira bahwa ada peningkatan ekspor kita 3,67 Miliar US\$. Ini ekuivalen dengan peningkatan 7,9% Pak ya dibandingkan dengan periode yang sama yang tahun lalu. Saya kira ini kabar gembira tapi ini kita ingin mendengarkan siapa yang mendapatkan nilai tambah Pak. Ada enggak nilai tambah bagi masyarakat bahari kita? Jangan sampai ini pengusaha saja. Ini pengusaha perikanan yang menikmati, pedagang yang menikmati sementara nelayan kita yang harusnya mendapatkan perlindungan Pak ya pemberdayaan dari negara tidak menikmati. Nah mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan kepada kita sebagai Menteri baru, kira-kira bagaimana caranya kedepannya Pak. Supaya nilai tambah ini dirasakan oleh masyarakat bahari kita, oleh nelayan kecil kita, oleh petambak garam kita, dan pembudidaya ikan kita.

Itu Pak Menteri ya.

Saya kira ini Pak Ketua masukan dan juga beberapa harapan kepada Pak Menteri yang pertama kali ketemu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Pak Bambang.

Silakan Pak Bambang.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan, dan seluruh Anggota serta Pak Menteri dan seluruh jajarannya.

Disaat anggaran KKP ini sangat terbatas kebijakan Pak Menteri yang akan mendorong pembudidaya dan para nelayan sekaligus untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional ini sangat cerdas. Akan tetapi ketika tidak didukung oleh penganggaran yang tepat saya kira ini juga sia-sia kebijakan Pak Menteri ini.

Perlu kami sampaikan untuk diperikanan, Dirjen Perikanan Tangkap ada kegiatan prioritas pengadaan kapal 5GT=85 unit, 10GT sebanyak 10 unit, kemudian 30GT sebanyak 2 unit. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 bahwa yang dikatakan nelayan kecil itu adalah 3 sampai 10GT. Lah ini yang 30GT ini untuk siapa? Pengusaha ini berarti. Nah ini jangan-jangan Pak Menteri enggak tahu ini. ini ada 2 unit. Alangkah baiknya ini direvisi, dialihkan ke nelayan kecil yang sangat membutuhkan Pak Menteri. Bahkan kami ini sudah menyampaikan dari awal RDP di Komisi IV untuk Kalimantan Tengah ini sampai saat ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari Kementerian bahkan saking saya ini menampung aspirasi, jaring pun saya beli sendiri Pak Menteri. Jadi ini perlu saya sampaikan. Oleh karena itu yang 30GT tolong itu digeser ke 3 sampai 10GT.

Kemudian yang kedua, lagi-lagi ini ada biaya yang sangat fantastis 63 Miliar untuk penyedot lumpur. Wah ini kan katanya pembudidaya. ... kecil-kecil. Ini ibaratnya untuk pengusaha ini. Lagi-lagi ini orientasinya ke pengusaha ini Pak Menteri. Daripada untuk penyedot lumpur ini sebaiknya dibelikan bioflog dan dibagi sama teman-teman. Saya yakin pembudidaya akan semakin berkembang.

Kemudian yang ketiga yang terakhir, ini juga modernisasi pakan ikan. Ada 10 unit dengan jumlah 15 Miliar. Ini untuk siapa ini? lagi-lagi ini

juga bukan pembudidaya kecil ini. Ini pembudidaya besar ini. Nah ini padahal pakan ikan itu Pak yang sangat diperlukan oleh pembudidaya adalah bahan baku pakan ikan. Ketika Kementerian bisa memecahkan persoalan bahan baku pakan ikan, insyaa Allah pembudidaya itu akan berkembang sesuai harapan dengan Pak Menteri. Jadi 3 hal ini. Tolong Pak Menteri nanti direvisi. Orientasi ke nelayan kecil. Saya yakin teman-teman juga akan mendukung, mengamankan program Kementerian dilapangan.

Terima kasih.

*Billauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Pak Bambang mungkin nanti dipertanyakan untuk pendalaman alur atau pembuang lumpur itu untuk apa. Kita tidak bisa sekonyong-konyong membuang tidak boleh, tapi mungkin dikecilkan boleh.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Ya ini kan orientasi ke nelayan kecil Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Johan Fraksi PKS.

Setelah itu Mbak Luluk.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua yang saya hormati saya cintai, dan seluruh Anggota Komisi IV, Pak Menteri dan seluruh jajarannya.

Saya harus jujur mengatakan Pak Ketua, saya jatuh cinta pada pandangan pertama sama Pak Menteri. Bayangkan dalam 1 kali Raker saja Beliau menyampaikan 3 terobosan. Ya menurut saya, saya penasaran sekali Pak Menteri karena ini terobosan 2021 sampai 2024. Meningkatkan PNBP, meningkatkan budidaya dengan pembangunan kampung nila, kampung lele, kampung rumput laut, dan kampung-kampung lainnya. Yang ketiga itu adalah penataan kampung-kampung pesisir. Ini kan luar biasa sekali. Enggak sabar menunggu 2024.

Nah karenanya saya ingin mendalami ini Pak Menteri. Kenapa saya bilang itu sebuah terobosan. Saran saya mudah-mudahan Pak Menteri

mau menambah 1 program terobosan lagi, memikirkan program garam rakyat ini. Karena Pak Menteri untuk biaya pikul itu jauh lebih tinggi dibanding dengan harga dari garam rakyat itu. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan terobosan.

Saya ingin mengajak Pak Menteri itu untuk mewujudkan dan saya akan mencoba kita Komisi IV mengawal terobosan ini. Soal PNB Pak saya tidak ragu. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu ilmuwan perikanan kelautan di Mataram. Sama persis dengan hitungan Pak Menteri 12 Triliun. Jangan-jangan memang pakar perikanan kelautan ini suka dengan angka 12. Padahal ukurannya Pak Menteri hanya ukuran Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan potensi ikan. Mungkin pada waktu masih booming-boomingnya lobster.

Nah harus bisa diberi gambaran kepada kita Pak Menteri, ini kan kalau kita lihat sarana-prasarana kita ini kan sangat kurang. Terus keberpihakan atau ciri kita sebagai masyarakat maritime itu tidak didukung oleh kebijakan Pemerintah. Bisa kita lihat anggarannya seperti ini. Nah ini kan tantangan-tantangan kita dalam mewujudkan terobosan-terobosan itu. Tetapi Inshaa Allah karena Pak Menteri seorang pedagang saya sangat yakin bahwa ini bisa di. Pedagang dia bilang bukan pengusaha. Jadi bisa mewujudkan program-program terobosan ini. Satu.

Yang berikutnya Pak, ketika kita bisa memberikan janji soal PNB sampai 12 Triliun itu, ini juga kita harus bisa menggerakkan Provinsi-Provinsi Pak. Jangan sampai nanti ketika PNB naik sampai hari ini Pak Provinsi-Provinsi termasuk Provinsi-Provinsi Kepulauan yang banyak laut dan ikannya ini retribusinya sangat kecil dari sector perikanan. Nah ketika kita bisa menaikkan PNB saya berharap pada saat yang sama retribusi dari sisi sector perikanan kelautan didaerah juga meningkat. Nah kalau ini bisa kita janjikan kepada mereka atau kita mengajak bersama-sama saya pikir Provinsi-Provinsi Kepulauan ini bisa bergerak secara bersama-sama Pak Menteri.

Yang kedua soal lobster Pak. Saya minta tolong agar dikaji lagi. Kita jangan juga terprovokasi dengan isu-isu lingkungan, isu-isu media dan segala macam. Saya seminggu lalu berkunjung ke namanya kampung Bumbang Desa Martak Lombok Tengah. Itu desa adalah lokasi pertama ditemukannya bibit lobster ini.

Nah kalau dialihkan ke budidaya Pak beda karakter lautnya. Karena rata-rata benih lobster ini ada di Selatan dengan arus yang begitu kuat. Kalau kita suruh mereka budidaya disitu Pak mati, ndak bisa dia berkembang. Jadi harus dibawa ke Utara. Nah mereka untuk pindah ke tempat lain mereka berurusan dengan penduduk-penduduk lain karenanya perlu dikaji kembali. Kalau pun kemudian kita melarang mereka untuk ... itu apa kira-kira menurut Pak Menteri itu kompensasi kita karena mereka nganggur hari ini Pak. Tetapi faktanya saya kasih tahu Pak Menteri juga mungkin Badan Karantina Pak Ketua, masih dengan kita melarang atau menstatus-kuokan tentang lobster ini, itu penyelundupan lobster terjadi.

Bagaimana Badan Karantina menjamin ini Pak. Mereka ketika dibuka Pak masih bisa dijual dengan harga 6000, 7000, 8000 yang pasir itu. Tetapi hari ini mereka ada yang beli 3000 saja itu dilepas. Nah jadi itu Pak Menteri. Jadi harapan saya termasuk soal kondisi yang ingin ditata dengan kampung-kampung pesisir Pak. Kampung pesisir kita hari ini itu pusat kekumuhan Pak. Pak Menteri harus bisa memberikan gambaran kepada kita ... kayak berapa. Sehingga nanti pada 2024 saya bisa lihat saya sebut kampung-kampung nelayan di tempat saya ada Labuan Jambu, Labuan Terujung, Labuan Teratas, segala macam, itu dan abrasi Pak. Nah saya berharap 2024 saya akan menagih janji Bapak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Johan.

Solusinya gampang kok. Kalau ada uangnya berikan alat budi daya. Suruh itu Slamet tuh, berikan kerambah suruh budi daya di lokasi setempat Pak Johan. Enggak cocok? Di Teluk Bumbang enggak cocok, Lombok Tengah. sini dikit. Oke. Nanti dipikirkan apa dibantu alat untuk jarring apungnya atau apa, ya Pak Johan ya?

Ada lagi?

Oh ya kasih Mbak Luluk ya.

Mbak Luluk silakan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Ketua.

Ibu Ketua, Pak Menteri yang saya hormati dan seluruh jajaran, Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang berbahagia.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Menteri ditengah harapan saya kepada kehadiran Bapak di tengah-tengah keluarga besar Komisi IV ini. Sekarang ini musim-musimnya hujan, kencang-kencangnya ya Pak Menteri ya diberbagai tempat bahkan disertai juga dengan angin yang sangat kencang. Nah ternyata dimusim ini juga bukan hanya sector pertanian dan kemarin kita sudah bongkar habis soal lingkungan yang punya masalah, ternyata yang pembudidaya ikan itu juga mengalami gangguan dan ancaman gagal panen. Kenapa? Karena serangan penyakit ikan itu mulai berdatangan pada masa-masa sekarang ini. Jadi air kolam misalnya yang tercampur air hujan, dan kemudian juga bakteri virus yang mulai menyerang, kemudian juga daya tahan ikan yang mulai menurun dan lain sebagainya. Oleh karena itu rekan-rekan kami ini yang kebetulan

enggak kelihatan lautnya kalau di Dapil itu pada mengeluh apa nih kira-kira yang bisa dilakukan oleh Pemerintah agar para pembudidaya ikan air tawar ini khususnya masih bisa tetap *survive* ditengah kondisi, cuaca, angin yang tidak menentu. Sebagian diantara mereka juga membutuhkan misalnya alat kincir air atau blower dan seterusnya.

Kemudian yang kedua saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh rekan terdahulu bahwa soal budidaya ini juga terkait langsung dengan kemandirian pakan Pak. Jadi pakan itu sudah menghabiskan sebagian besar biaya produksinya mereka. Dan kita juga tahu bahwa pakan ini umumnya masih tergantung kepada impor terutama tepungnya. Nah ini penting kita meminta kepada Kementerian yang ingin mencoba menghidupkan badan risetnya untuk bisa menghasilkan pakan yang mandiri dan berbahan baku local. Kalau pakan mandiri tapi bahan bakunya masih impor ya sama saja. Karena apa, karena pasti ini akan menghabiskan sebagian biaya produksi kita. Nah ini yang kita akan dorong ke Kementerian bagaimana caranya ini bisa menjawab persoalan yang sebenarnya sangat klasik yang menimpa para pembudi daya.

Kemudian yang kedua, catatan yang terkait dengan produksi perikanan Pak. Ini kira-kira catatan saya yang kaitannya dengan produksi ekspor ya. Terkait dengan ekspor produk perikanan ke Amerika. Jadi ada data yang kami terima dari US food and drug administration (FDA) per Desember 2020. Jadi masih agak gress. Bahwa ada 97 kasus penolakan ekspor perikanan dari Indonesia. Nah ini ternyata bukan hanya kejadian yang pertama. Dulu pernah sekali sudah terjadi dan kemudian terjadi lagi. Sebagian ini ditolak karena apa, karena didominasi jadi produk kita yang kita ekspor itu didominasi oleh kondisi yang sangat jorok. Jadi ada produk yang kita ekspor itu jorok busuk, kemudian ada bakteri salmonella, kemudian ada kloram penikol, kemudian ada juga kombinasi antara persyaratan sanitasi yang tidak memenuhi syarat bahkan ada kesalahan pelabelan dan lain-lain sebagainya. Dan ini juga didominasi oleh antara lain ikan tuna. Nah ini teman-teman mungkin di Maluku dan seterusnya. Nah apa yang sudah dilakukan kira-kira oleh Kementerian KKP, terutama juga yang bagian pengendali mutu. Barangkali untuk memastikan bahwa hal semacam ini tidak terulang lagi. Dari 97 tadi yang saya sebutkan sampai sekarang kondisinya masih ditahan di American. Jadi masih dianggap tidak memenuhi syarat. Nah apakah juga ada langkah-langkah misalnya diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah kita termasuk dengan menggunakan kekuatan atase perdagangan kita yang ada disana agar produk yang tadi dicekal itu bisa dijembatani atau difasilitasi.

Yang berikutnya saya ingin sampaikan ke Pak Menteri bahwa konsumsi rata-rata ikan nasional kita ini masih sangat rendah sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara di Asean. Malu kan kita ini. 23 sektor perikanan kelautan kita tetapi justru kemampuan rakyat kita, entah kemampuan atau literasi yang soal pentingnya makan ikan itu masih rendah. Nah saya sangat mendukung kalau kemudian program-program yang berbasis kemasyarakatan yang terutama sekali mendorong agar minat makan ikan sekaligus perbaikan mutu dan gizi masyarakat terutama

didaerah-daerah yang misalnya rawan pangan, rawan stunting itu diperluas dipertambah. Kita butuh betul itu dukungan politik agar ancaman stunting di Indonesia ini bisa antara lain dijawab oleh Komisi IV. Contohnya saja misalnya di Dapil saya, dan saya yakin juga ini Dapilnya sahabat-sahabat yang lain terutama NTT dan lain sebagainya. Kabupaten Sragen Aceh itu padahal Jawa Pak. Yang namanya privelensi stunting presentasinya itu masih 39,32%. Ini jauh dibawah angka Jawa Tengah dan lebih jauh lagi diatas Jawa Tengah dan diatasnya nasional rata-ratanya. Nah hal-hal semacam ini enggak bisa dengan pendekatan yang biasa-biasa saja. Oleh karenanya pasti membutuhkan dukungan dari KKP untuk intervensi program yang terkait langsung dengan kondisi perbaikan dan penurunan angka stunting melalui gemar ikan.

KETUA RAPAT:

Ada lagi Mbak Luluk?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Baik. Satu kali lagi yang terakhir saja Pak Ketua. Nah yang berikutnya sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh kawan, dan disampaikan oleh Pak Menteri pada saat Raker. Pertama sekali kita berharap betul bahwa 3 proposal atau lamaran Pak Menteri ke Komisi IV yang terkait dengan penambahan PNBK yang sampai 12 Triliun itu kita bisa diberikan gambaran dengan cara apa itu akan dicapai. Hal-hal yang terkait dengan daya dukung, kemampuan, KKP untuk bisa menghasilkan angka itu caranya seperti apa. Kemudian dari tingkatan Eselon I yang kira-kira punya tanggung jawab besar untuk bisa memastikan bahwa itu bisa dicapai 12 Triliun itu yang mana yang harus diperkuat. Karena jangan sampai impian Pak Menteri ini tidak bergaris lurus ya tidak bersambung batin dengan kemampuan dari Eselon-Eselon I yang karenanya ini perlu mendapatkan dukungan dari Bapak.

Dan terakhir, saya masih sangat berharap sekali karena memang perairan dan kelautan kita sangat luas. Ada teknologi dan system yang menjamin bahwa pengawasan dari KKP ini bisa maksimal bukan hanya sekedar illegal fishing tapi juga yang terkait dengan kejahatan perairan dan perikanan.

KETUA RAPAT:

Cukup Mbak Luluk ya?

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Iya.

Terima kasih Ketua.

Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sehat.

KETUA RAPAT:

Pak Ansi Lema.

Silakan, 2 menit.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.

Pak Menteri yang terhormat,
Pak Sekjen, para Dirjen, dan jajarannya.

Ini kesempatan saya Pak. Saya Ansilema Fraksi PDI-Perjuangan dari Nusa Tenggara Timur Pak.

Saya mau menyampaikan selamat dan proviciate buat Pak Menteri KKP yang baru Pak Sakti Wahyu Trenggono. Harapan kami Pak, semoga kehadiran Bapak di KKP ini bisa membawa angin segar dan arah baru untuk melakukan transformasi besar Pak. Harapan kami seperti itu Pak.

Pertanyaan saya mungkin umum saja Pak karena saya belum mengenal Bapak dari sisi isi kepala Pak terkait dengan aspek kelautan dan perikanan Pak. Pertanyaan saya sederhana, dengan kondisi COVID dan anggaran yang tidak sampai 1/2% dari postur APBN kita, KKP ini mau dibawa kemana Pak. Apa yang membedakan Kementerian KKP dibawah Bapak dan yang sebelumnya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Seingat saya ketika dilantik 2019 lalu Presiden Jokowi itu menegaskan tentang pentingnya membangun sector perikanan budidaya dan juga menjalin kemitraan atau komunikasi dengan stakeholder perikanan dan kelautan Pak. Bagaimana Bapak menafsirkan visi ini dan Presiden Jokowi itu punya visi besar soal poros maritime dunia Pak. Langkah konkrit yang terukur itu kira-kira seperti apa Pak. Karena terus terang Pak menurut saya kehadiran Bapak ini menghadirkan ekspektasi banyak pihak Pak untuk melakukan hal-hal baru out of the box di KKP ini Pak.

Yang kedua agak spesifik, saya juga ingin mendengar kebijakan Menteri yang baru terkait dengan kebijakan perijinan benih lobster Pak. Apakah pembukaan keran ekspor benur lobster ini tetap dilanjutkan. Setahu kami karena PNBPN lobster ini sejak tahun-tahun lalu itu belum keluar Pak, kan har ini dihentikan sementara Pak. Kami ingin tahu progressnya seperti apa Pak.

Yang kedua dibalik ekspor benur ini. Kata kunci yang sangat penting itu adalah budidaya Pak. Nah kebijakan terkait dengan budidaya lobster kita ini kami juga ingin tahu Pak.

Yang berikut soal karena saya kebetulan dipercayakan oleh Fraksi saya masuk dalam Tim terkait dengan Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Pak. Dan kita tahu bahwa ini terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang pemanfaatan dasar laut, penangkapan ikan, melindungi perairan nasional beserta berbagai potensinya Pak. Mungkin KKP perlu share konsep KKP terkait dengan RUU ini Pak. Sehingga kita juga bisa saling mendiskusikan tentang hal ini Pak.

Yang berikut ada program yang namanya Desa Wisata Bahari Pak. NTT itu the master of piece of god. Provinsi Kepulauan 2/3-nya laut Pak. Saya baca kok tidak ada satu pun ya program untuk Desa Wisata Bahari itu didapatkan di NTT. Padahal kalau bicara keindahan wah luar biasa Pak. Alor itu keren sekali Pak. Saya meminta keberpihakan Pak terkait dengan program ini. Sehingga kemudian Provinsi saya ini juga bisa dapat. Karena mohon maaf Pak, saya tidak ingin membandingkan dengan Provinsi lain Pak. Saya melihat ada Provinsi lain yang secara karakteristik tidak jauh beda dengan kami Pak tetapi alokasi bantuannya itu timpang Pak. Dapatnya banyak sekali sementara kami tidak ada Pak. Nah ini saya berharap aspek justice ini keadilan ini tolong diakomodir Pak.

Yang terakhir saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada beberapa program yang kami terima di NTT Pak. Salah satunya itu terkait dengan bantuan bioflog. Jujur saya mau menyatakan masyarakat senang karena di tempat saya itu saya dapat tempat parkir Pak, banyak Pak. Terima kasih. Persoalannya adalah soal pakan Pak. Ketergantungannya itu pakan didatangkan dari luar NTT dan itu mungkin *high cost* ekonomi juga Pak. Belum lagi kalau waktu memindahkan pakan dari Pulau Jawa ke NTT ini kan memakan waktu Pak, bukan tidak mungkin akan rusak. Mungkin perlu dipikirkan tentang bagaimana membangun kemandirian pakan berbasis konteks local. Jadi kontekstualitasnya itu perlu Pak. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan.

Terakhir sekali Pak, pariwisata berbasis bahari. Tadi sudah ya terkait dengan Desa Wisata Bahari itu. Saya mohon Pak di Alor Pak satu Pak, karena seingat saya Tahun 2020 saya beserta Direktur itu sudah diskusi dengan masyarakat di Pulau Alor. Alor ini Daerah Pemilihannya Ibu Julie Sutrisno Laiskodat (Ibu Gubernur NTT). Tolong Pak saya minta ijin.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Ansi Lema?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Cukup Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Ichsan Firdaus.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik.

Terima kasih Ketua.

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pak Menteri yang saya hormati, jajaran Eselon I dan para Pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan.

Saya Ichsan Firdaus Pak, Fraksi Partai Golkar.

Ada setidaknya 3 hal yang ingin saya sampaikan Pak Ketua. Saya ijin. Pertama adalah terkait dengan keinginan dan ambisi Pak Menteri untuk bagaimana menaikkan PNBP menjadi 12 Triliun yang menurut saya dalam hitungan Pak Menteri sebagai seorang pengusaha itu mungkin realistis Pak. Tapi dalam pemahaman saya ini yang kita perlu koreksi Pak, saya hanya ingin bercerita bagaimana 5 tahun yang lalu ada keinginan dari Menteri yang lalu agar terkait dengan pelarangan cantrang Pak. Secara visi secara keinginan itu benar. Artinya bagaimana kemudian sustainability itu berjalan. Tetapi kenyataan dilapangan Pak ketika kemudian pelarangan cantrang itu diiringi dengan janji dari Menteri yang lalu agar ada pergantian alat tangkap Pak. Ribuan alat tangkap itu disiapkan, dianggarkan Pak. Tapi ternyata kenyataan dilapangan itu banyak sekali persoalan pergantian alat tangkap itu. Termasuk juga pengadaan kapal Pak. Akhirnya apa, 2 tahun berturut-turut yang saya tahu KKP mengalami persoalan baru. Disclaimer 2 kali berturut-turut Pak. Artinya bukan anggarannya, bukan keinginan tetapi pelaksanaan dilapangannya bermasalah Pak.

Nah saya hanya ingin ingatkan sama Pak Menteri bahwa keinginan PNBP yang 12 Triliun itu, itu juga harus diiringi kesiapan dari mesin birokrasi dan peraturan-peraturan yang kemudian membelenggu itu semua. Jangan sampai punya keinginan tapi ditengah jalan berantakan Pak. Ambil contoh yang kedua SKPT. SKPT ini selama 5 tahun keinginannya benar Pak untuk pemberdayaan atau kemudian penguatan pulau-pulau terluar di Indonesia. Tapi detik ini Pak, Bapak cek ada sekitar 7-8 SKPT seperti apa Pak. Saya lihat anggarannya juga operasional ... dengan yang terpadu itu. 750 juta per SKPT Pak rata-rata. Ini buat apa

Pak? Jangan sampai itu buang-buang anggaran Pak. Tetapi juga kemudian SKPT ini benar Pak. Tetapi khawatir kedepannya malah mangkrak. Banyak program-program KKP yang punya keinginan besar tapi kemudian ditengah menjadi mangkrak hanya karena kemudian ketidaksiapan kita.

Ini yang saya hanya ingatkan Pak Menteri. Termasuk juga ketika Pak Menteri untuk melakukan revitalisasi produksi perikanan budidaya yang besar-besar. Kalau memang itu dilakukan Pak, kita harus juga siapkan terkait dengan mesin birokrasinya Pak. Daya dukung daerah juga. Jangan sampai kita sudah mengalokasikan anggaran besar-besaran kesitu tetapi kemudian ditengah jalan malah mangkrak.

Saya tidak tahu ada program di Badan Riset yang namanya Iya Mari Pak. Apakah kemudian itu mangkrak atau tidak. Kita cek Pak sama-sama. Artinya jangan sampai punya keinginan ketidaksiapan birokrasi, ketidaksiapan peraturan dan ketidaksiapan daya dukung anggaran Pak. Ini benar kita lakukan tetapi jangan sampai ditengah jalan ini mangkrak lagi, mangkrak lagi Pak. Banyak sekali misalnya keinginan untuk pengadaan kapal pengawas. Katanya multiyear tetapi kemudian ditengah jalan mangkrak lagi Pak. Sayang kasihan anggarannya Pak.

Saya setuju Pak kalau kemudian kita dorong agar perikanan budidaya ini besar-besaran. Tetapi tolong Pak jangan sampai kejadian kayak seperti cantrang dan kejadian SKPT sekarang. SKPT, SKPT Sumba Timur 750 Juta Pak, 500 Juta. Dalam 1 tahun SKPT buat apa Pak? Tapi sayang juga serba salah juga kalau kemudian tidak dilakukan karena ini operasional SKPT. Nah artinya kita satu-satu saja Pak. SKPT mana yang kita kemudian selesaikan satu demi satu. Ada 7. Coba kita siapkan 2 misalnya, mau pakai anggaran APBN, mau pakai apa terserah. Tapi kita selesaikan satu-satu Pak, jangan sampai 750 Juta tapi hanya sekedar operasional semata. Ini yang saya Cuma ingatkan sama Pak Menteri.

Yang kedua adalah termasuk bagaimana kemudian daya dukung daerah. Kemarin juga sama seperti di Kementerian Pertanian bahwa kalau kita mengandalkan anggaran belanja pusat Pak hanya 6 Triliun dengan 514 Kabupaten/Kota baik itu budidaya maupun perikanan tangkap tetapi kemudian daya dukung daerah tidak kita siapkan. Termasuk misalnya saja saya hanya ingin ingatkan dengan dana alokasi khusus. Coba tanya, saya mau tanya sama Pak Sekjen berapa DAK Pak? Tahun ini, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Enggak lebih dari 1,5 T Pak. Daya dukung daerah Pak, bagaimana pun kalau kemudian dibebankan kepada anggaran belanja pusat berapa besar Pak. Keinginan teman-teman tadi mulai dari jaring, pengadaan kapal, pengadaan mesin pakan mandiri. Kalau kemudian dengan 6 T buat apa Pak. Kasihan beban anggarannya KKP ini Pak. Tetapi kemudian daya dukung belanja yang dikhususkan untuk daerah juga kecil. Artinya harus dipikirkan strategi yang matang Pak, bagaimana agar ada 1 fokus atau 2 fokus tetapi ini tuntas. Saya hanya ingin ingatkan itu Pak Ketua.

Yang terakhir Pak Ketua, terkait dengan revitalisasi tambak Pak. Ada 5 revitalisasi tambak. Saya dukung Pak 100% daya dukung itu. Tapi kalau kemudian itu tidak dipakai skema yang lain Pak diluar anggaran negara diluar APBN rasanya menurut saya itu akan terbuang percuma. Saya setuju dengan Pak Menteri bahwa APBN ini hanya stimulus tapi bagaimana stimulus ini memancing anggaran-anggaran lain untuk bisa memback-up KKP. 6T belanja pusat beban anggaran yang terlalu tinggi. Eh beban KKP dengan anggaran yang begitu kecil menurut saya ini harus dipikirkan strategi matang sehingga tidak banyak sekali anggaran yang, keinginan terlalu besar tapi kemudian anggarannya kecil dan daya dukung birokrasi juga kecil. Itu yang saya inginkan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Bagus.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ketua, saya boleh interupsi sedikit?

Karena Pak Ichsan tadi menyebut SKPT di Sumba Timur.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar.

Pak Bagus Adhi dulu baru anda.
Iya Bagus.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Yang terhormat Bapak Menteri.,

Jadi pada hari ini saya ingin mengajak Bapak Menteri beserta jajaran, ada kejutan. Sudah sekian tahun kita berkecimpung berbicara tentang anggaran dan sebagainya namun hal yang membanggakan di KKP ini belum ada Pak. Jadi yang pertama, jadi dengan situasi sekarang pandemic ini bagaimana kita betul-betul berpihak kepada masyarakat. Kita bicara dibudidaya. Di budidaya kita sangat lemah di bibit. Benih kerapu kita turun. Ini tanggal 16 kita mengajak, coba saya tebar 3000 kerapu kita mau evaluasi seperti apa. Sesudah itu di udang bagaimana dan sebagainya. Nah jadi di BBI kita ini banyak sekali yang belum teroptimalisasi Pak. Disini

gerakan nyata harus ada di budidaya itu. Nah dan saya terima kasih dan senang Pak Menteri sudah mengutamakan kampung lobster. Beberapa bulan yang lalu saya bersama Menko Perekonomian Pak Airlangga. Kita sudah deklarasikan kampung lobster Pak. Kalau kita pelihara lobster dengan baik itu lumayan pendapatannya.

Nah disini kendalanya apa, ini KJA kita terbatas sekali Pak. Ini keberpihakan Pemerintah dalam kaitan pengadaan KJA dan pendampingan teknologi serta pakan ini penting sekali Pak. Nah sekarang yang ada masyarakat budidaya lobster ini sangat-sangat alami Pak. Jadi saya sering terjun mendampingi masyarakat Karena itu Bapak sekarang bagaimana betul-betul bisa mewujudkan kampung lobster itu, di Bali, daerah lain, banyak sekali Pak bisa kita wujudkan. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri.

Yang kedua terkait dengan Desa Wisata Pak. Ini akan sejalan dengan kampung lobster, Desa Wisata, mangrove Bapak perlu diperbaiki. Cobalah kita buat satu kejutan. Di mangrove itu kita bangun gazebo-gazebo, jembatan. Jadikan, apalagi sekarang revolusi 5.0 katanya. Orang lebih banyak mengaktualisasikan dengan teknologi. Nah kalau KKP bisa melahirkan kampung wisata dengan modernisasi, dengan mewujudkan objek wisata baru itu luar biasa kepemimpinan Bapak. Bapak pasti akan mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat setempat, begitu juga Presiden. Jadi perlu Bapak memberikan perhatian khusus terkait dengan kalau bisa wujudkan kampung wisata ini atau Desa Wisata ini berlebihan anggaran lebih banyak akan bisa mewujudkan itu 2 kejutan itu ya kampung lele dan desa wisata itu.

Terus yang terakhir, ini di koral Pak. Koral anggarannya begitu besar. Tadi mungkin teman-teman sudah ada yang menyuarakan. Jangan sampai dana besar ini akan berdampak kepada rusaknya alam. Perlu sekali dilakukan pendampingan yang kuat Pak. Kelompok-kelompok masyarakat sudah menemukan teknologi-teknologi. Namun ada juga yang melakukan kenakalan-kenakalan koral tersebut. Nah disinilah perlu sekali pendampingan terkait dengan kegiatan-kegiatan itu Pak.

Jadi perlu adanya teknologi yang modern. Karena kita melakukan budidaya koral ini dengan baik yang kemudian kita bisa mewujudkan pemandangan yang bagus sekali di dasar laut kita kalau kita melakukan budidaya-budidaya koral dengan baik dan benar. Nah itu yang bisa disampaikan. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh Pak pasti bisa. Pasti bisa Pak. Dan tadi teman-teman juga nelayan.

Nah disini nelayan sedang menjerit sekarang Pak. Beli perahu enggak bisa. Kemarin saya ke Nusa Penida pembudidaya rumput laut, dari tadinya dia pengelola hotel, pengelola vila. Sekarang sudah terjun ke laut lagi Pak. Sudah kembali jadi nelayan Pak, pembudidaya rumput laut. Cuma kendala mereka apa, kendala mereka adalah perlu dilakukan suatu zona budidaya rumput laut sehingga tidak terbentur lagi posisi rumput laut. Jadi perlu adanya penataan-penataan dimana zona-zonanya ditata dengan

baik yang kemudian dia kurang perahu dan sarana-sarana lain. Ini perlu menjadi perhatian Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Bagus.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati jalan yang baik untuk kita semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Ansilema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri,

Saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Saudara saya Pak Ichsan Firdaus tadi. Karena menyebut SKPT itu ada di 2 Dapil saya Pak, di Sumba Timur dan di Rotendau. Saya memahami ini merupakan keberpihakan negara dalam hal ini KKP terhadap daerah-daerah terluar, terpinggirkan, terisolir. Karena itu saya kira catatan dari Pak Ichsan itu jangan sampai keliru dipahami. Yang saya tangkap adalah Beliau ingin mendorong bahwa SKPT ini harus berhasil. Di Sumba Timur dan Rotendau sehingga kemudian kesiapan-kesiapan itu harus bisa ditempuh secara professional. Dan kita berharap SKPT di 2 daerah ini yang merupakan daerah-daerah marginal ini Pak. Kedepan akan menjadi roll model bagi pengembangan SKPT-SKPT di tempat lain Pak.

Saya hanya ingin menegaskan itu saja sebagai suatu bentuk respon atas apa yang disampaikan oleh Saudara saya Pak Ichsan tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup?

Kamu mau ngomong Slamet?

Ya ngomong.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Ketua,

Kok nyuruhnya ini pakai intimidasi ini. Awas ada MKD ini Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau enggak jadi ngomong saya tutup nih.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Jadi Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya udah ngomong.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Karena saya ngomong perintah Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan Abah Sudin yang saya hormati. Abah Sudin orang tua saya disini Beliau.

Bapak Menteri, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, dan semua Pejabat KKP yang saya hormati dan banggakan.

Yang pertama, saya mengapresiasi terhadap KKP karena Alhamdulillah akhir-akhir ini KKP sudah mulai punya taring lagi khususnya di fungsi pengawasan sumber daya kelautan. Alhamdulillah kemarin berturut-turut menangkap adanya kapal laut. Cuma kami perlu mengingatkan Bapak Menteri, Bapak Sekjen, Pak Dirjen bahwa kami mendapatkan informasi bahwa ada namanya Badan Keamanan Laut Pak ya (Bakamla). Dan hari ini mungkin semua sudah tahu bahwa Bakamla sedang menyusun RPP analisa keamanan laut.

Yang saya inginkan bahwa hari ini jangan sampai fungsi dari pengawasan sumber daya kelautan ini dibawah kendali Bakamla. Karena ketika kita lihat terkait di Pasal 1 tentang ketentuan umum dianalisa Pasal keamanan laut bahwa Bakamla merupakan lembaga Pemerintahan non Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan.

Jadi ini sifatnya koordinasi Pak. Karena kita lihat di Pasal ini ada yang mengatur bahwa meminta semua aparat laut itu untuk sesaat dan sedang operasi untuk lapor kepada Bakamla. Jangan sampai PP Bakamla ini secara hukum mengalahkan dan menganggap lebih tinggi daripada Undang-Undang Perikanan ataupun Undang-Undang bahkan sampai

Undang-Undang Perhubungan Pak. Jadi kami minta ketegasan dari Pimpinan Komisi IV bagaimana ini perlu disikapi bersama Pak. Kalau ini tidak disikapi dengan serius maka marwah dari KKP ini tidak ada Pak dalam fungsi pengawasan sumber daya kelautan. Apalagi dalam hal pencegahan *illegal fishing*.

Jadi ini perlu disikapi tegas Pak. Perlu melakukan koordinasi dengan BAKAMLA. Jangan sampai PSDKP ini nanti punya 2 matahari Pak. Cukup 1 matahari Pak. Jadi kalau di Partai Amanat Nasional itu cukup 1 sinar matahari yang bersinar Pak.

Yang kedua.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Ada 2 Ketua. Kan arahan.

KETUA RAPAT:

Ya sudah cepetan.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Yang kedua, saya mengingatkan kepada Bapak Menteri hari ini untuk fokus Pak. Artinya fokus misalkan hari ini kalau KKP ingin fokus bagaimana ingin melakukan revitalisasi tambak ataupun ingin memberikan ikon di KKP karena kita lihat KKP *reborn* itu istilahnya bagus saya. Artinya apa hari ini?

KETUA RAPAT:

KKP rebon maksudnya.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Jadi artinya sekarang KKP ini concernnya apa yang ingin ditonjolkan kepada publik misalkan ingin tonjol diperikanan budidaya itulah yang ditonjolkan. Sehingga ada sistem, ada suatu ikon yang fokus untuk diciptakan oleh Kementerian KKP.

Yang ketiga, saya ingin titipkan Madura Pak Menteri. Karena Madura ini bagian dari Jawa Timur dan bagian jantung hidup dari Indonesia. Jangan sampai Madura ini minta mandiri Pak Menteri. Cukup Madura ini minta menjadi Provinsi Kepulauan Madura yang akan digagas dan akan ... melalui Kelautan dan Perikanan.

KETUA RAPAT:

Cukup-cukup. Ujung-ujungnya Slamet ini minta kapal.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Bagaimana Ketua?

KETUA RAPAT:

Sudah cukup?

Sudah enggak usah sebutkan.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Sekian.

Mator Selangkong.

Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi dianggapnya Dirjen ini Dirjen Tangkap ini lupa daratan. Sesama sekampung tapi enggak kasih perahu untuk kapal nelayan. Harusnya anda sensitive satu kampung loh. Itu yang dia maksudkan tadi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, daerah mana itu? Sumenep apa?

KETUA RAPAT:

Tahulah sekampung ini berdua ini. Sudahlah pakai tadi KKP *reborn*-lah, apalah. Bilang saja minta kapal gitu untuk nelayan saya. Itu kan untuk kesejahteraan rakyat enggak masalah.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Kalau dikasih tidak menolak Ketua, dan sangat berharap.

KETUA RAPAT:

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan jawaban. Waktunya 10 menit.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Aduh pertanyaannya banyak benar nih Pak Ketua. Kalau saya dikasih waktu 10 menit berarti saya jawab yang paling penting saja. Karena yang paling penting biasanya yang penuh harapan.

KETUA RAPAT:

Ya kalau enggak 10 menit saya kasih lagi 10 menit, 20 menit. Karena sebelum maghrib rapat ini kita harus tutup.

Silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi nanti saya kira Pak Sekjen sama beberapa Dirjen saya minta bantu saya untuk menjawab yang belum terjawab. Tapi banyak tadi pertanyaannya soal bagaimana sebetulnya merealisasikan PNBK. Nah terus terang saja untuk merealisasikan PNBK itu kata awalnya adalah kita lihat dari contoh saja 2020 itu 380 Triliun yang tadi Bapak Sudin atau siapa tadi yang mengatakan bahwa itu hanya pengusaha saja yang menikmati itu tapi negara tidak mendapatkan apa-apa.

Jadi 2 hal. Yang pertama adalah ini kita sedang melakukan suatu perhitungan dan mere-engineering daripada kenelayan ini. Bersamaan dengan seluruh Eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya minta karena implikasinya panjang. Mulai dari nanti nelayan yang 5GT, 10GT, 20GT sampai 30GT itu seperti apa. Lalu nelayan 30 GT keatas seperti apa. Lalu apakah dibuat satu zonasi misalnya setiap WTP, atau 2 WTP atau 3 WTP digabung menjadi satu lalu dihitung disitu berdasarkan kajian daripada Komnas Siskan itu berapa. Lalu kemudian yang boleh diambilkan. Ini scientist yang kita pendekatan. Karena dari situ kita kemudian kita over kepada pembeli. Jadi bukan nelayannya. Nelayannya tetap masyarakat nelayan yang kita akan bina. Mereka adalah bekerja mandiri. Hasilnya langsung ditangkap oleh pengusaha kita. Pengusahanya bisa siapa saja. Yang sekarang ini ada juga boleh atau yang langsung pembeli dari luar.

Jadi sedang dirancang semua tetapi belum menjadi suatu keputusan. Lalu kemudian nanti dalam perjalanannya juga kejadian-kejadian seperti tunanya rusak, dan lain sebagainya. Saya juga melihat sendiri tadi. Kemarin ketika saya pergi ke Ambon pagi-pagi saya melihat bagaimana tuna itu turun. Tapi sudah ada beberapa yang sudah mulai membusuk.

Nah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Jadi kita bagaimana memperbaiki dengan anggaran yang ada tentu tidak mungkin. Karena luasan kita itu adalah 6,4

juta kilometer persegi laut. Jadi tidak mungkin kita bisa menangani dengan angka seperti itu.

Nah lalu kemudian implikasinya juga soal pengawasan. Saya terus terang agak shock, kaget, sedih juga oleh Bapak yang mengatakan bahwa Bakamla yang Bakamla sedang menyusun RPP Saya memohon kepada Bapak Ketua melalui Ibu-Ibu, dan Bapak Anggota Komisi IV ini untuk mendukung agar PSDKP ya tetap masih mengurus soal harta negara dibidang perikanan. Karena itu adalah sumber daya manusia perikanan. Ini yang saya kira menjadi penting untuk kemudian kita dibantu dan memperjuangkan.

Nah itu nanti akan Jadi 2 hal outputnya nanti setelah skemanya nanti terbentuk tentu kami tidak akan putuskan sebelum kami diskusi dengan para Pimpinan dan Bapak Ketua Komisi IV sebagai partner kami.

Yang pertama adalah nelayan yang tadi bekerja entah dia itu adalah 1 rombongan nelayan. Secara korporasi dia memiliki 1 kapal yang kemudian hasilnya sudah membuat perjanjian kerja dengan pembeli. Di satu pusat dia harus landing pointnya disitu misalnya seperti itu. Lalu kemudian apakah misalnya nelayan itu mereka bekerja sebagai nelayan lalu kapalnya milik. Bisa saja milik para pengusaha-pengusaha yang di wilayah Pantura banyak. Beberapa orang teman-teman kita memiliki beberapa kapal nelayan. Nah ini sama, dia juga kan butuh pembeli.

Nah ini pembelinya kita berikan. Nah namun disitu saya melihat bahwa sekarang ini sudah diberikan asuransi oleh biaya negara oleh Pemerintah. Asuransinya Cuma satu yaitu asuransi kecelakaan. Bahkan sering becanda saya di Kantor, waduh Pak kalau ada kecelakaan istri senang. Aduh *astagfirullahal'adzim*. Masa begitu. Karena dapat itu. Asuransi itu asuransi kecelakaan kalau tidak celaka ya tidak pernah ada pendapatannya. Nah sepehaman saya asuransi itu bisa ditingkatkan atau dilverage. Bukan hanya kecelakaan ditambah lagi dengan asuransi kesehatan. Kalau dia sakit, kan pasti juga ada sakitnya entah dia atau keluarganya tergantung dari preminya yang bisa kita.

Yang ketiga bisa dilverage lagi ke tunjangan hari tua. Ya terserah kalau dia umur 10 tahun masih mau melaut ya boleh-boleh saja tapi asuransi bisa juga mengatakan bahwa setelah umur 60 kamu boleh ambil menjadi bagian dari tunjangan hari tuanya. Kan ini menarik sebetulnya kalau kita desain dengan baik dan benar. Lalu kemudian populasi daripada perikanan disetiap WPP juga bisa kita jaga karena angka kapalnya kita jaga. Untuk itu diperlukan satu system pengawasan baik melalui teknologi maupun pengawasan secara fisik yang namanya PSDKP tadi. Jadi PSDKP itu ngawasannya bisa sectoral misalnya WPP 714, 715, 718 sudah, segitiga itu misalnya yang diawasi. Lalu nanti ada lagi.

Jadi ini sekaligus Ibu, bukan hanya untuk lumbung ikan nasional di Ambon. Itu adalah suatu model saja tapi setelah model itu jadi nanti WPP yang diatas Bu yang berbatasan dengan lautan pasifik itu, itu enggak

pernah terjaga. Kita enggak tahu di sebelahnya kita itu jangan-jangan ada kapal besar nongkrong disitu yang kemudian seluruh nelayan-nelayan kita ini kesitu misalnya. Kita enggak pernah tahu karena kapal PSDKP kita kapalnya kecil bahkan tidak masuk dalam kategori OVP. Kalau di Angkatan Laut itu ada OVP yaitu operasi yang beberapa mil. Tapi ada lagi yang kelasnya perigat. Mestinya PSDKP itu punya kapal sekelas perigat yang 138 meter. Nah kalau itu gagah. Ketemu sama kapal besar yang tadi ship tadi itu kabur dia. Begitu dia lihat kita kabur pastinya. Kalau yang sekarang itu Hiu ORC itu. Dia datang itu diledek.

Nah sekarang ini kalau misalnya bisa nangkap. Yang ditangkap kebanyakan adalah kapal kayu dan kapal kecil. Belum pernah kita melihat menangkapnya kapal besar itu. Nah enggak tahu kalau dulu Satgas 115 yang kemudian bergabung ada Angkatan Laut didalamnya bahkan dan sebagainya mungkin Pak itu pernah. Tapi ini saya kira.

Nah peningkatan daripada PSDKP yang ngawasin lautan yang begitu luas dimana Selat Malaka sering dari Malaysia turun ke kita, kemudian Natuna. Waduh saya pikir kalau 380 Triliun itu yang berhasil kita rekam. Saya kok punya keyakinan sebetulnya lebih dari itu yang sebetulnya diambil orang kesana. 380 Triliun kita rekam ini negara enggak dapat apa-apa loh. Kecuali pajak mungkin kalau itu terdaftar perusahaannya.

Nah ini saya mencoba. Mencoba kepada Bapak/Ibu semua disini untuk kemudian mari kita hitung. Saya akan membuat suatu formulanya bersama dengan kawan-kawan di Kementerian KP lalu kemudian saya akan share. Tapi saya punya keyakinan untuk maxion duable bisa dijalankan. Jadi kalau enggak bisa dijalankan saya akan katakan ternyata tidak bisa dijalankan.

Nah yang saya hitung nanti kalau sudah per zona WPP sudah pasti adalah kapal diatas 30GT misalnya atau minimal 200GT, dan jumlah kapalnya pun bisa dihitung misalnya enggak boleh over fishing. Kalau over fishing nanti seperti laut Jawa. Laut Jawa ini kalau orang dikasih ijin, kamu hanya di laut jawa misalnya. Kamu hanya boleh di 712, waduh dia pulang nangis, 3 bulan muter-muter enggak dapat ikan karena sudah over fishing. Nah ini salah satu.

Kemudian ada satu lagi misalnya berapa yang dilaut selatan. 571 dan 572. Itu wilayahnya zonanya sampai lautan Hindia yang ikannya adalah tuna, cakalang dan lain sebagainya, dan itu besar sekali. Kalau lewat sedikit yakin saya akan ketemu dengan kapal China yang sangat besar yang mereka sudah punya program. Begitu perkasanya dia dilautan lepas untuk ambil ikan-ikan dilautan lepas dibawa ke China karena dia memang tidak punya laut yang besar seperti kita.

Nah ini misinya. Jadi mohon misi ini mendapat dukungan dari Bapak/Ibu semua supaya PNBP dengan target tadi. PNBP bisa terealisasi dan nelayan bisa sejahtera. Ya mungkin kalau ini bisa terealisasi inilah

prestasi daripada Bapak/Ibu yang ada semuanya disini. Kebetulan saja saya memulai. Karena program ini saya yakin kalau ini dicanangkan baru bisa terealisasi mudah-mudahan di Tahun 2022 bisa terealisasi.

Nah selanjutnya adalah budidaya. Ketika saya jumpa dengan Duta Besar Norwegia, saya tanya berapa lama Norwegia itu melakukan budidaya? Dia mengatakan 50 tahun budidaya dia lakukan sampai dia berhasil. Produk unggulannya nomor satu itu adalah salmon, lalu nomor dua makarel, dia bilang begitu. Lalu saya tanya sama dia, coba kasih masukan ke saya. Kalau Indonesia kira-kira itu produk unggulannya apa yang bisa kita kembangkan untuk budidaya. Dia langsung jawab, waduh saya enggak tahu ya mungkin karena iklim dan lain sebagainya, seterusnya, seterusnya. Saya langsung mikir, kok begini. Oh ya sudah memang persaingan. Iya kan.

Nah jadi saya pikir kalau kemudian kita bicara lobster. Mohon ijin Pak Hasan, nanti saya mau main ke tempatnya Bapak di Sumba. Saya kok masih menyakini namanya lobster ini budi daya akan bagus. Hanya soal teknologi lalu kemudian metode dan ketekunan. Nah itu saja.

Jadi kalau ketekunan, metode, dan lain sebagainya kita sudah bisa menguasai, yakin saya budidaya yang namanya lobster ini akan menjadi salah satu produk unggulan Indonesia. Jadi jangan lagi yang menikmati itu adalah Singapura sama Vietnam. Selama ini kita tuh sudah dinabobokan, diambil terus lewat Singapura nanti terus kemudian dikirim Vietnam. Dia menikmati begitu besar, hanya melepas uang 23.000. 23.000 sebagai basic price di lobster yang bukan Pak, bukan Pak. Yang pasti ... lalu yang mutiara 70.000 umpamanya saya mendengarnya.

Nah ini kalau kita jalankan kayak gitu terus kemudian selisihnya itu kalau dia tahan sampai 1 tahun bisa menjadi 1 kilo. Setahun 1 kilo bisa 1 juta lebih. Bayangkan kalau 1 tahun itu dihitung costnya mata rantainya banyak sekali, mulai dari budidaya kepiting sampai ke budidaya kerang ijo sebagai makanannya lobster itu. Itu juga mata rantainya banyak. Ini semua kerja semua akhirnya begitu.

Nah itu kalau dihitung costnya menurut saya paling 30% dari ... price produk yang sudah jadi. Tahanlah sedikit. Kalau kita belajar tahan sedikit ... kita ya tambah sedikit. Yakin saya nanti akan ada pengusaha-pengusaha sukses lobster di Indonesia. Dan itu menjadi satu obsesi saya dalam 3 tahun 10 bulan sampai 2024 harus terlahir itu, entah 3 atau 4 pengusaha yang hebat itu. Saya akan bombing kita bina langsung bahkan saya akan terjun sendiri untuk konek dengan pasar dan lain sebagainya. Saya punya keyakinan itu. Kalau enggak optimis kita berat juga.

Lalu soal tadi kapal 30GT.

Asuransi nelayan sudah.

Kemudian klaster budidaya. Jadi kembali saya sampaikan, budi daya itu kan memang butuh endurance, butuh ketahanan kita. Kalau tadi misalnya

di Norway itu butuh 50 tahun, saya belum tahu di Jepang mungkin saya juga akan riset juga akan tanya disana. Nah di kita itu kita akan menentukan berapa point kira-kira yang sudah menjadi kita kuat, contoh misalnya tuna yellow fin. Saya pernah ke Bali yang Balai Riset di Bali itu. Dia sudah bisa. Sudah bisa pemijahan artinya sampai jadi bikin anakan. Tapi waktu saya tanya, loh kenapa tidak dijualbelikan. Dia bilang ini kecepatan tuna ini 80 kilometer per jam. Jadi nabrak terus. Jadi mati terus. Saya lagi kepikiran, bagaimana caranya kita bicara sama Gubernur-Gubernur di Kepulauan itu yang ada Teluknya misalnya itu ditutup ya misalnya lalu kemudian tuna itu dilepas.

Nah itu budidaya. Apa mungkin itu? Segalanya tidak ada yang tidak mungkin selalu pasti mungkin. Nah kalau kebijakan itu dilakukan, koneksi dengan investor itu ya mohon maaf karena saya tadi diluar menyebut dengan beberapa Bapak-Bapak saya pedagang ini. Hitungan saya ini berapa spending, returnnya itu berapa.

Jadi kalau kita spending sesuatu, return kepada negara juga harus sesuatu. Kalau kita hanya mengharapkan misalnya minta kepada Menteri Keuangan agar ... tambahan kita saya dengan kondisi yang sekarang ini saya agak kurang yakin bisa dipenuhi apalagi sudah anggaran kecil saja sudah diperes lagi coba 157 Miliar. Itu kan menandakan saking susahya. Jadi kita harus keluar dari ruang itu. Itu maksud saya.

Kemudian soal Desa Wisata. Betul sekali kalau di Daerah NTT, Daerah Sumba apalagi Pak. Sumba itu daratannya itu padang savanna, bahkan ferari saja sampai waduh lewat situ coba. Kemudian di Sumba itu ada hotel nomor 1 didunia namanya Nihi Watu. Kalau mau pesan dulu waktu jaman belum Covid mungkin 2 tahun pesannya baru bisa kesana. Tapi sekarang mungkin gampang Pak karena kosong.

Nah soal Desa Wisata, memang belum terakomodir di APBN regular. Namun sedang direncanakan dari anggaran belanja tambahan. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Lokasi dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan.

Nah namun diluar ini Pak, tadi pagi saya diskusi dengan Dirjen PRL (Pengelolaan Ruang Laut). Bahwa wisata bahari ini sebetulnya yang mendesain itu ya silakan sih sebut saja misalnya Kementerian Pariwisata. Kita ini menyiapkan regulasi bahwa di wilayah itu boleh dilakukan untuk kegiatan wisata. Dengan persyaratan bahwa akibat dari wisata itu, wisata bahari itu tidak akan merusak dan menghancurkan lingkungan. Karena kalau bicara wisata pasti mobilitas orang akan menjadi meningkat dan lain sebagainya. Ini domainnya Kementerian KKP disitu.

Jadi karena kalau bicara wisata itu kan ada Menterinya. Demikian Pak. Namun demikian tadi dijawab oleh Pak Sekjen bahwa soal Desa Wisata di NTT akan diajukan. Demikian Pak Sekjen ya.

Saya kira sementara itu. Mungkin kalau ada yang belum terjawab saya persilakan.

Oh ya soal garam. Nah soal garam. Kebetulan saya agak sedikit paham Pak soal garam. Garam ini lawan kita tidak sebanding. Lawan kita itu adalah diluarnya. Dari sisi produk mereka itu adalah danau yang tinggal dikeruk saja tidak perlu cost. Sementara kalau kita ada proses penyaringan yang kemudian dan itu costnya itu tentunya kalau bisa dihitung pasti lebih tinggi daripada danau yang Tuhan memberikan danau kepada. Yang saya tahu di Australia itu benar-benar danau yang tinggal dikeruk saja.

Jadi hampir enggak ada *cost*. *Cost*-nya ngeruk doang. Nah kalau itu dibandingkan dengan hasil yang dilakukan oleh petani garam kita jauh sekali kualitasnya. Dari alamnya sendiri sudah beningnya sudah seperti air ini. Ya dalam bentuk Kristal. Begitu kita gandengin pasti enggak bisa. Nah namun saya punya pemikiran. Saya tetap berjuang melalui Menkomar Invest dan Menko Perekonomian pada waktu saya sampaikan tetap mereka menggunakan neraca selalu dengan diskusi dan mereka berjanji bahwa seluruh garam rakyat ini akan diambil lalu kemudian kekurangannya adalah impor.

Nah walaupun saya merasa bahwa kalau impor ini untuk industry katakan misalnya itu semuanya ke industri. Saya sih sebagai kembali lagi orang pasar, itu saya enggak yakin. Pasti selalu ada rembesan. Rembesan juga pasti ada. Nah tinggal putar otak nih. Bagaimana caranya supaya garam rakyat ini bisa terakomodir dan bisa keluar solusinya.

Saya balik lagi ke BRSDM. Itu sudah ada satu model garam-garam itu bisa diolah sedemikian rupa, dia menjadi garam-garam yang kualitasnya sangat tinggi dengan atau konten ingredientsnya juga bisa berubah, bisa untuk spa untuk apa dan lain sebagainya. Lalu saya terinspirasi ketika saya ke Tel Aviv. Disitu ada garam. Garam yang bentuk lumpur, bentuk segala macam, buat kecantikan. Ya saya pikir kenapa enggak kita lakukan. Tapi ini baru pemikiran yang perlu study mendalam agak berbeda dengan PNBP tadi. Saya sudah gamblang gambarannya kalau PNBP itu sangat bisa dilakukan selama mendapat dukungan dari Komisi IV. Nah tapi kalau industry garam ini butuh 1 tahapan lagi proses. Sekarang sementara kita berjuang melalui Pemerintah untuk supaya seluruh produksi garam yang konon ada 100.000 petani garam. Saya mau datang Bapak/Ibu tetapi karena situasi COVID jadi belum sempat terus, dan juga rapat melulu di Jakarta. Saya kira itu.

Baik. Itu mungkin dari saya.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ketua ijin.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Mungkin Pak Sekjen barangkali bisa menyampaikan termasuk melanjutkan.

KETUA RAPAT:

Tadi Menteri mengatakan tidak ada wisata bahari. Ini ada 17 paket. Kami mengusulkan tadinya harus jadi 100 paket. Ini tolong Eselon I beserta Karo Perencanaan kalau Menterinya salah, ditanya belum ada penjelasan dikasih tahu dong. Tadi kan Pak Menteri tidak tahu segalanya. Enggak membaca juga program segalanya. Tadi ditanya katanya enggak ada padahal ada. Yang kiri-kanan ini harus ngasih tahu dong.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Mohon ijin Pak.

Bukan saya tidak tahu. Tadi saya katakan yang tadi ditanya disana nanti akan diajukan. Tapi saya cerita bahwa saya diskusi dengan PRL sebaiknya memang kedepan yang namanya wisata bahari itu, itu jangan kita yang mendesain, kita yang menjalanka. Karena tugas kita itu bukan pengelola pariwisata tetapi adalah menjaga ekosistem kelautan itu atau bahari yang digunakan pariwisata. Itu penyampaian saya kepada Dirjen PRL kedepan Pak. Kalau yang sudah ada ya sudah karena itu sudah diprogramkan didalam anggaran berikut ini.

Demikian Pak. Mohon maaf kalau tadi saya agak keliru dalam menjelaskan.

KETUA RAPAT:

Ya karena disini kan ada yang 17 paket. Ini loh. Kemudian tadi masalah tuna yang diekspor ke Amerika, kemudian kena masalah. Ini kan tugasnya BKIPM. Jangan sudah dapat ijin ekspor tidak ada pengawasannya. Sama juga kalau di Kementerian Pertanian rilis benih jagung yang dihasilkan oleh Litbang setelah rilis tidak pernah ada pengawasannya.

Jadi kalau sudah 10 kali tanam jadi bibit, tanam jadi bibit otomatis produktivitasnya rendah. Kalau rendah jadinya KW3 atau HU3. Kasihan rakyat yang dapat bantuan itu. Dan saya juga ingatkan Eselon I maupun Biro Perencanaan, program bukan karena uang tapi uang itu harus dijadikan program apa. Ini yang penting. Uang sekian jadi program ini, uang sekian program ini. Dengan catatan harus *clear and clean* jangan sampai ada temuan lagi di BPK. Karena setiap kali selesai rapat ini baik bahan rapat maupun kesimpulan rapat saya kirimkan ke BPK untuk minta bantuan audit. Karena kami memahami kami tidak pandai mengaudit.

Kemudian dari PT Garam, ada yang mau disampaikan?

Bapak datang jauh-jauh loh Pak. Ngomong Pak.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO) (ACHMAD ARDIANTO):

Baik.

Terima kasih.

Pak Ketua, Anggota DPR dan Pak Menteri.

Terima kasih atas kesempatannya. Kami sampaikan bahwa kinerja PT Garam Tahun 2020 sangat berat karena memang harga garam sangat rendah. Saat ini berkisar Rp400,00 karena memang harga impor sangat murah Pak. Rp450,00 itu CIF di Surabaya, Jakarta atau Medan. Sehingga apabila diminta untuk bersaing head to head ongkos angkut dari Madura ke Surabaya itu Rp100,00. Dari Madura ke Jakarta itu Rp300,00 per kilogram. Sehingga untuk bersaing dengan garam impor yang sekali datang itu 60.000 ton memang tantangan besar bagi kami. Namun PT Garam siap untuk bersaing. Disisi lain apabila PT Garam bersaing dengan garam impor maka akan menekan posisi petani. Situasinya akan menekan posisi petani karena para pembeli akan berusaha membeli harga garam dibawah pembelian ke PT Garam.

Nah ini memang dilema bagi kami sehingga sering kali kami harus menyeimbangkan Pak. Kadang-kadang kami tidak menjual karena supaya harga terangkat. Seperti saat ini kami berusaha menjual di angka Rp650,00 supaya pembeli mau membeli di harga petani disekitar 500-an. Resikonya keuangan kami akan berat. Kami tidak punya *cashflow* tapi itulah resiko yang siap kami mitigasi.

Kemudian kami juga sedang berupaya membina petani untuk membentuk ekosistem pertanian garam yang bersinergi antara petani dan PT Garam, serta para pengusaha sektor pergaraman. Sehingga kita bersama-sama meningkatkan kualitas garam rakyat dan garam PT Garam di wilayah Madura.

Kemudian terkait program kami di NTT. Kami memiliki lahan Pak 300 hektar di NTT. Dan kami punya stok 26.000 saat ini yang memang sulit dijual dari NTT, karena memang biaya transportasinya sangat besar Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau dari NTT ke Surabaya berapa?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO):

Saat ini kira-kira ongkos angkut dengan kapal tol laut itu 15 juta per container Pak. Jadi kira-kira Rp400,00 per kilogram.

KETUA RAPAT:

Ongkos angkutnya?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO):

Iya. Sehingga pembeli itu membeli negative margin. Jadi dari harga jual ditempat dikurangi ongkos angkut dikurangi margin dia, itulah harga beli di NTT. Nah ini memang harga belinya jadinya diatas harga pokok produksi kami. Dan lokasi kami memang agak jauh di Bipolo. Sehingga saat ini apalagi hujan deras disana, susutnya jadi besar. Jadi banyak yang terbawa air.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Ijin Ketua.

Dimana Pak?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO):

Di Bipolo Pak.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Polo?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO):

Bipolo.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Bipolo itu dimana?

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO):

NTT Kupang Pak, Kabupaten Kupang.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Soalnya di Kampung saya ada Bolo juga.

DIREKTUR UTAMA PT GARAM (PERSERO):

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau kita lihat keterangan dari PT Garam ini, sampai Surabaya Rp400,00 sedangkan ongkos angkut kalau dari Madura ke Surabaya

Rp300,00. Kalau dari NTT ke Surabaya Rp400,00. Mungkin kalau ke Jakarta bisa 500 atau 600 Rupiah. Berarti kemahalan di transportasi ya.

Setahu saya Menteri dulu yang lalu-lalu. Kalau mau impor garam itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Teknis. Entah itu Kementerian Kelautan dan Kementerian Perindustrian.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Melalui rapat Pak. Melalui Rapat Gabungan ... dengan Menko.

KETUA RAPAT:

Ya berarti kan bukan rekomendasi Menteri. Kalau yang lalu itu, mau minta impor harus ada rekomendasi. Disesuaikan dengan musim garam ini. Sama juga sekarang itu masalah kedelai. Kedelai itu bebas. Saya punya duit, saya ke Kementerian Perdagangan saya minta impor, imporlah. Jadi tidak ada rekomendasi dari Kementerian Teknis. Ini yang mengakibatkan hancurnya harga. Kedelai tiba-tiba 9000. Kedelai lokal berapa? Produktivitasnya rendah. Harga jual 6000, untungnya 1 hektar 1 juta. Makanya disinilah peran Pemerintah untuk turun membantu.

Kemudian Perinus ada masalah?

Mau sampaikan?

Perinus?

DIREKTUR UTAMA PT PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO) (FARIDA MOKODOMPIT):

Dari kami tidak ada Pak Ketua.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Perindo?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA (FATAH SETIAWAN TOPOBROTO):

Ijin Pak Ketua, tidak ada dari kami Pak.

KETUA RAPAT:

Enggak ada?

DIREKTUR UTAMA PERUM PERIKANAN INDONESIA:

Enggak ada Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Teman-teman sudah cukup?

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ketua.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Setengah menit.

KETUA RAPAT:

Sebentar.

Iya Pak. Bapak yang banyak ikan Pak. Bapak yang ngomong duluan.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih.

Ini Pak Menteri, saya itu pertanyaannya mudah saja. Yang saya tanyakan itu apakah rumpon yang tersebar diseluruh Indonesia ini legal atau tidak? Itu yang pertama. Ini kan ada Peraturan Menteri Nomor 26 ini tadi. Legal atau tidak, karena KKP itu sudah mengeluarkan kurang lebih sekitar 4 Triliun sekian ijin kapal. Yang didalamnya ada kurang lebih sekitar 1500 yang ada hubungan dengan rumpon. Kalau kita tidak menyelesaikan atau harmonisasi soal Perment 26 ini juga jadi masalah. Saya kan Cuma minta kira-kira sejauhmana harmonisasinya.

Lalu yang kedua, yang tadi disampaikan juga mungkin saya harapkan harga jual menjadi perhatian, dan jembatan perikanan yang kena bencana alam. Dan itu sangat diharapkan. Saya yakin kalau Pak Menteri sampai disana itu pasti diharap oleh masyarakat.

Saya kira demikian Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup?

Setengah menit.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Iya.

Terima kasih.

Saya mohon kepada Pak Menteri, mungkin untuk memberikan perhatian dan penguatan sedikit peran BKIPM di Daerah Perbatasan ya Pak, terutama yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Contohnya yang terakhir Pak Ketua yang saya utarakan yang setiap malam itu ada jalur keluar kepiting-kepiting, dan lain-lain itu luar biasa, dan hanya ada 1 pemain tunggal disana. Yang saya heran kalau tidak salah disana ada Perindo ya Pak ya? Nah tetapi kondisinya itu justru fakum padahal pelabuhannya dan semua asetnya disana. Yang saya heran kenapa Perindo tidak melakukan ekspor dari sana dan langsung ke negara tujuan padahal disitu ada bandara, dan lain-lain. Itu saja sih. Saya hanya mohon nanti ada penjelasannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

1 menit Ketua.

KETUA RAPAT:

Fraksi Golkar mau ngomong?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya saya mau ngomong.

KETUA RAPAT:

Iya ngomong.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bu Luluk tadi ½ menit, saya 1 menit saja Pak Ketua.

Pak Menteri,

Saya senang kalau kemudian Pak Menteri ingin mengatur WPP Pak. Dan kemudian tadi dengan ambisi PNBK 12 Triliun itu. Cuma mungkin armada kita ini agak menjadi masalah Pak Menteri. Coba nanti cek sama Dirjen PSDKP, dari 100% armada pengawasan kita ada berapa yang masih berfungsi? Dan kemudian cukup enggak kemudian mengawasi WPP yang sampai 11 ini Pak. Artinya apa yang tadi disampaikan Pak Menteri itu juga yang tadi saya sampaikan dari awal, apa yang diinginkan kita lihat kondisi dilapangan Pak. Pertama adalah armada pengawasan, bagaimana WPP yang 11 ini bisa diatur dengan baik, dengan armada yang baik. Sehingga kemudian

Bakamla. Jangan sampai kemudian Bakamla menganggap ini diambil alih gitu sama Bakamla. Tapi kalau kemudian armadanya cukup kuat enggak ada masalah, tapi kalau armadanya enggak kuat kita harus atur dengan baik. Itu yang pertama.

Yang kedua pelabuhan. Sebagai pusat dana penangkapan. Betul kita punya PNB 12 Triliun misalnya kepengen. Tapi bagaimana datanya. Benar enggak hitung-hitungannya dengan pelabuhan itu. Artinya revitalisasi pelabuhan menjadi penting.

Yang ketiga Pak Menteri terkait dengan budidaya. Saya setuju Norway saja sampai 50 tahun. Pertanyaan saya adalah kita punya rotmap atau blueprint besar enggak tentang budidaya kita ini. Jangan sampai Pak Menteri sudah menjabat 3 tahun tapi Menteri berikutnya mangkrak lagi. Jadi saya ingin mendorong KKP ini punya blueprint atau rotmap sampai 50 tahun atau berapa pun tahun, 25 tahun. Sehingga nasib-nasib seperti SKPT, nasib beberapa program yang sebenarnya dengan ambisi besar tapi kemudian ditengah jalan mangkrak lalu kemudian mati. Saya ingin ingatkan itu Pak Menteri. Jangan sampai kemudian kita buang-buang anggaran tetapi ditengah jalan ganti Menteri ganti kebijakan.

Yang terakhir Pak Ketua, ini kecil saja. Tapi saya ingin 1 tahun ini KKP ini kan agak down. Kemarin Menteri Kelautan kita yang lalu temannya Pak Khalid itu senang dengan pakai seragam KKP ini Pa. Saya hanya ingin ada kebangkitan, ada. Katanya *reborn* tapi ada kebanggaanlah kalau kemudian Pak Menteri pakai seragam KKP. Saya Cuma ingatkan itu saja. Sehingga kemudian pegawai-pegawai KKP juga senang kalau Pak Menterinya pakai seragam. Kecil saja Pak Menteri.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau tadi Norwegia 50 tahun. Sekarang pakan kita saja kapan mandiri, kapan mau majunya. Pakannya masih beli. Sekarang itu kan ada Litbang, ada budidaya. Hal yang mudah membuat pakan ikan lele itu mudah sekali. Jadi jangan pernah terlalu juga dimanjakan kasih pakan, kasih pakan. Berubah. Kasih mesin pembuat pellet ikan. Itu kan enggak mahal biayanya. Iya kan. Berapa juta sih paling.

Tadi dikatakan oleh siapa tadi, bahan baku enggak ada. Pellet itu apa sih bahannya. Ampas bungkil, atau mungkin kelapa sawit campur tepung ikan, campur dedak. Tinggal di molen dibuat chip. Kan begitu. Enggak usah umpan, pakan ikan-pakan ikan. Stoplah bantuan dari luar. Kita ubah mindsetnya bagaimana. Rakyat kita mandiri dan harus maju dengan bantuan apa adanya.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.PN.):

Ijin Pimpinan.

Interupsi.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.PN.):

Sekedar informasi saja. Karena tadi Pimpinan bicara soal pakan ikan. Di Dapil saya, saya sudah ketemu dengan masyarakat yang mampu membuat mesin pakan ikan ini. Dan saya sudah memberikan bantuan berupa drum bekas disana. Itu ada di Kota Lumbuk Linggau. Jadi kalau misalkan teman-teman dari KKP ingin ketemu dengan mereka yang memang belajar ke Universitas Gadjah Mada saya bersedia mempertemukan dengan teman-teman dari KKP.

Terima kasih.

Itu sekedar informasi saja.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu.

Di KKP banyak Bu S1, S2, S3. Yang belum ada S7. Kalau tawaran Ibu gitu sangat baik sekali. Ini untuk kemajuan bersama. Jadi tolong Pak Slamet sama Litbang pikirkan itu. Anggap yang sudah diprogramkan tetap berjalan tetapi 2022 saya minta stop bantuan pakan tetapi berikan bantuan mesin pembuat pakan ikan. Ya, itu saja.

Terima kasih atas tanggapan, saran dan lain-lain. Sekarang kita akan menyampaikan membacakan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini.

Silakan Pak Hasan.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Bismillah.

Saya bacakan kesimpulan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan penghematan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan program vaksinasi nasional dimasa pandemi COVID-19 sebagaimana berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan

realokasi belanja Kementerian atau Lembaga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp157.665.596.000,00 dari pagu awal sebesar Rp6.652.139.393.000,00 menjadi sebesar Rp6.494.473.797.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Minta tolong para Eselon I diamati angkanya. Kalau memang tidak sesuai langsung interupsi supaya cepat berjalan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

- Sekretariat Jenderal semula sebesar Rp497.646.140.000,00 menjadi sebesar Rp488.651.137.000,00.
- Inspektorat Jenderal sebesar Rp86.767.955.000,00.
- Dirjen Perikanan Tangkap semula sebesar Rp763.577.487.000,00 menjadi sebesar Rp733.852.850.000,00.
- Dirjen Perikanan Budidaya semula sebesar Rp1.212.740.404.000,00 menjadi sebesar Rp1.190.280.866.000,00.
- Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp1.078.052.922.000,00 menjadi sebesar Rp1.049.215.656.000,00.
- Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp431.704.028.000,00 menjadi sebesar Rp417.063.946.000,00.
- Dirjen Pengelolaan Ruang Laut semula sebesar Rp455.357.175.000,00 menjadi sebesar Rp433.842.426.000,00.
- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp1.522.573.626.000,00 menjadi sebesar Rp1.499.224.972.000,00.
- Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan semula sebesar Rp603.719.656.000,00 menjadi sebesar Rp595.573.989.000,00.

Apakah para Anggota setuju?

Pak Menteri sepakat?

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tunggu-tunggu Pak.

Tolong pakai mic karena kami rekam Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menggenjot produksi perikanan melalui pengembangan klaster kawasan budi daya tambak, dan pengembangan kampung budi daya udang, lele, patin, kerapu, lobster, rumput laut dan ikan endemik atau lokal Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing agar tidak mengalami kepunahan.

Anggota?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Substansi setuju tapi kata “menggenjot” itu digantilah.

KETUA RAPAT:

Oh ya. Tadi saya hampir tersenyum.

KETUA RAPAT:

Ini Pak Johan nih ... nih.

KETUA RAPAT:

Ya meningkatkan produksi.

Sudah sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

Bagaimana Pak Menteri, sepakat kan?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Sepakat.

KETUA RAPAT:

Iya.

3. Komisi IV DPR RI mendukung KKP untuk meningkatkan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan volume ekspor hasil kelautan perikanan secara bertahap hingga Tahun 2024 melalui komoditas unggulan.

Anggota?

Pak Menteri, ada yang berat?

Sepakat Pak?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju, sepakat.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk berupaya kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas agar melakukan penambahan alokasi anggaran Tahun 2021 dan tidak melakukan pemotongan anggaran kembali di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena berdasarkan data yang ada hingga saat ini anggarannya tidak sampai 1% dari APBN mengingat sektor kelautan perikanan merupakan pangan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat sehari-hari masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ini tambahkan saja Ketua kata-kata untuk berupaya mungkin untuk melakukan komunikasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. Kan berupaya itu enggak ada artinya itu komunikasi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau komunikasi pengertiannya cuma ngomong doang nanti. "berupaya" sudah benar.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua,

Redaksionalnya, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengupayakan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan lanjut. Ini hanya redaksional saja.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Substansinya sama.

Kita simak. Nomor 4 setelah diubah berbunyi: Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengupayakan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bapenas agar melakukan penambahan alokasi anggaran Tahun 2021 dan tidak melakukan pemotongan anggaran kembali di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena berdasarkan data yang ada hingga saat ini anggarannya tidak sampai 1% dari APBN. Mengingat sector kelautan perikanan merupakan pangan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat sehari-hari.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

“masyarakatnya” dibuang.

KETUA RAPAT:

Masyarakatnya dibuanglah.

... sehari-hari sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Setuju Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Nanti diperbaiki redaksinya. Yang penting nanti substansi isi sama sepakat kan?

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk melaksanakan pendampingan dan supervisi atau pengawasan secara internal yang intensif oleh Inspektorat Jenderal terhadap semua program dan kegiatan Tahun.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Point 5 dulu Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh 5 dulu ya, sorry.

5. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk menyerap produk local yang dihasilkan pelaku usaha kelautan dan perikanan atau UMKM, seperti kapal perikanan, alat penangkap ikan, pakan ikan, obat ikan, keramba, olahan berbahan dasar ikan, dan sejenisnya dalam rangka

membangun perekonomian masyarakat kelautan perikanan termasuk perempuan pelaku utama sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Disitu sudah ada dicantumkan. Pelaku usaha kelautan perikanan atau.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Coba dibaca, jangan berhalu sendiri.

Itu loh dibaca.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk melaksanakan pendampingan dan *supervisi* atau pengawasan secara internal yang insentif oleh Inspektorat Jenderal terhadap setiap program, dan kegiatan Tahun 2021 guna peningkatan penyerapan anggaran dan peningkatan bantuan Pemerintah yang tepat sasaran sebagaimana usulan dan kebutuhan aspirasi masyarakat kelautan perikanan agar lebih sejahtera atau makmur.
Anggota?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk meningkatkan penyerapan realisasi anggaran bantuan pembiayaan permodalan dan membuat formulasi model system penyaluran dana kelola BLU-LPMUKP, dan KUR, serta sektor kelautan perikanan sehingga pelaku usaha kecil dapat naik kelas, dan yang menengah bisa dapat menjadi pendampingan usaha budidaya penangkapan, pengelolaan, dan pemasaran, jasa perikanan dan pergaraman, serta masyarakat pesisir lainnya sehingga produknya dapat berkualitas dan bermutu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Itu BLU-nya BLU LPUMKP. "U-nya" digeser.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar.

Sektor kelautan perikanan sehingga pelaku usaha kecil menengah dapat meningkatkan kualitasnya (engga naik kelaslah).

Bagaimana Pak Ansi, Pak Dosen?

Ya meningkatkan kualitasnya. Bukan kelaslah. Meningkatkan kualitasnya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua,

Pertanyaan, yang mau ditingkatkan ini adalah produknya atau derajat usahanya?

KETUA RAPAT:

Semua Pak.

Kesejahteraan lahir dan bathinnya.

Ya sebenarnya cukup disitu.

Bagaimana sepakat?

Anggota?

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Johan setuju?

KETUA RAPAT:

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Sebentar Pak lagi baca Pak.

KETUA RAPAT:

7. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk meningkatkan penyerapan realisasi anggaran bantuan pembiayaan permodalan dan membuat formulasi model system penyaluran dana kelola BLU LPMUKP, dan KUR, serta sector kelautan perikanan sehingga pelaku usaha kecil menengah.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kalau kualitasnya sudah meningkat apakah dia harus bermutu?
Dibawahnya ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Oh enggak itu dihapus Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Menurut kualitasnya melalui pendampingan usaha saja harusnya.

KETUA RAPAT:

Ya sudah cukup itu.

“dapat berdaya saing”.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ya itu malah bagus “dapat berdaya saing”.

Iya pas.

KETUA RAPAT:

Sepakat Pak?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Sepakat.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk menjaga dan meningkatkan kualitas mutu dan kemasan produk hasil perikanan dalam penyaluran bantuan Pemerintah seperti kegiatan gemar makan ikan, bakti nelayan, bakti mutu karantina dalam rangka meningkatkan kesehatan dan imun tubuh masyarakat kelautan perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

9. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mengevaluasi sentra kelautan dan perikanan terpadu di Pulau-Pulau terluar Indonesia agar pembangunannya tidak mangkrak dan menjadi monumen sehingga perlu upaya memfokuskan beberapa SKPT saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan mengingat penggunaannya hanya bersifat operasional.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Penggunaan anggaran. Mungkin anggaran yang terbatas Pak sehingga tidak semua.

KETUA RAPAT:

Mengingat penggunaannya hanya bersifat.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Mengingat anggaran yang terbatas. Itu saja.

KETUA RAPAT:

Ya tadi terlalu teknis.

Sepakat?

Setuju Anggota?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Substansi setuju. Pembangunannya itu kurang "n" satu.

KETUA RAPAT:

Oh ya. Nanti menyempurnakan setelah jedok.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

"penggunaannya" dibuang. Mengingat penggunaannya terbatas. Enggak usah pakai penggunaan.

KETUA RAPAT:

Saya baca:

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi sentra kelautan dan perikanan terpadu di Pulau-Pulau terluar Indonesia agar pembangunannya tidak mangkrak dan menjadi monumen. Sehingga perlu upaya memfokuskan beberapa SKPT saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. Mengingat penggunaannya terbatas.

Setuju?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

10. Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk menjalankan operasional Amari di Kabupaten Pangandaran dan Pulau Morotai Maluku Utara guna optimalisasi pemanfaatan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Yang punya Maluku, setuju Morotai?

Setuju Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

11. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk menyusun perencanaan lumbung ikan nasional di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan potensi karakteristik dan peruntukan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pak Abdullah Tuasikal?

Bu Alien?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

12. Komisi IV DPR RI mendukung KKP untuk terus menjaga ekosistem sumber daya ikan diseluruh wilayah perairan Indonesia melalui operasi kapal pengawas di Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terutama di perairan yang berpotensi terjadinya penyelundupan dan pelanggaran *IUU Fishing*.

Setuju Anggota?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bahasanya jangan penyelundupan dan pelanggaran Ketua. Kalau ilegal itu ya memang sudah pelanggaran. Jadi terjadinya saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

“Penyelundupan dan pelanggaran” dihapus.

Anggota?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tapi pengertiannya gini loh. PSDKP ini berhak menangkap penyelundup benih lobster di bandara. Dia punya hak. Karena kalau kita BKIPM enggak mungkin. Enggak mungkin punya kemampuan. Contoh, yang kemarin dari Lampung ke Jambi atau dari Lampung ke Palembang. Itu kan umumnya, kalau enggak pakai mobil ambulance, pakai apa bawa benihnya pakai itu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Atau bahasanya begini Pak Ketua, terjadinya *IUU fishing* serta pelanggaran lainnya. Penyelundupan pelanggaran itu memang. Serta pelanggaran hukum lainnya. *Illegal Unreported* itu ya fishing ya memang itu serta pelanggaran lainnya. Nah kira-kira itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Silakan Pak Menteri dikomentari. Ini kan menyangkut Tupoksi biar tidak melanggar juglak jugnisnya nanti.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Pelanggaran lainnya ini susah diterjemahkan.

KETUA RAPAT:

Serta pelanggaran lainnya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kalau penyelundupan benih lobster di bandara. Termasuk?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Kalau menurut saya termasuk. Itu kan illegal Pak.

KETUA RAPAT:

IUU Fishing juga?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Iya, illegal. Fishing itu maksudnya kan nelayan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Fishing itu perikanan Ketua, termasuk lobster ikan Ketua.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

(Suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Boleh dong.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ya boleh.

Fishing itu bukan hanya diluat tapi di semuanya juga. Sama seperti perbedaan shrimp sama sheep kata Pak Slamet itu.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Sudah sepakat?

Pak Menteri?

Setuju Anggota?

(RAPAT: SETUJU)

13. Komisi IV DPR RI meminta KKP berkewajiban dan berkomitmen untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan saran dan masukan dari Anggota Komisi IV dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja.
Anggota?

Jadi rekomendasinya mengikat Pak. Harus setuju. Ini untuk saya Pak.

(RAPAT: SETUJU)

14. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan dokumen program dan kegiatan Tahun

Anggaran 2021. Selanjutnya diserahkan ke Komisi IV DPR RI paling lambat 2 hari setelah Rapat Kerja hari ini.

Terlalu mepet Pak?

7 hari? Kelamaan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Permasalahannya Pak siklus itu Bapak tanggal 12 sudah harus menyerahkan ke Kementerian Keuangan. Coba Karocan, tanggal berapa penyerahan DIPA ini RKA K/L ke Kementerian Keuangan. Kalau Bapak minta seminggu ya sudah telat Pak. Justru kalau besok kalau bisa. Kalau bisa besok itu sudah diserahkan ke Komisi. 2 hari Pak. Kalau bisa besok karena Pak Hasan mau pulang, Pak Dedi mau pulang kampung. Ini memudahkan Bapak-Bapak loh. Kalau saya mah 5 hari iya saja saya. Tapi tidak bisa ditandatangani nanti.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Tanda tangan Pimpinan Pak. Ya enggak apa-apa kalau ke Probolinggo Pak, Trenggono.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Baik-baik Pak.

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

15. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan jawaban tertulis pada Raker hari ini selambat-lambatnya 2 hari setelah Rapat Kerja berlangsung.

Senin? Ya. Hari kerja ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya sudah selambat-lambatnya hari Senin saja. Tanggal berapa itu? Tanggal 15.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih atas tanggapan. Semua rancangan telah kita setuju bersama oleh Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV, Pak Menteri, Sekjen, dan segenap Pejabat Eselon I serta BUMN mitra kerja KKP ikut

menyaksikan persetujuan tersebut. Semoga persetujuan ini mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Sebelum saya menutup, kami persilakan statement akhir Raker pada hari ini disampaikan oleh Pak Menteri.

Kami silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan, Bapak Ketua, Wakil Ketua, seluruh Anggota Komisi IV DPR RI,

Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh masukannya, dan juga penilaiannya. Mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan berikut seluruh yang menjadi ganjalan bisa terkoreksi dengan baik, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, kerjasama dan seterusnya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Demikian Raker pada hari ini telah berakhir. Dengan mengucap "Alhamdulillahirobil'amin". Saya atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV manakala ada tutur kata yang kurang berkenan mewakili semuanya mohon maaf lahir dan bathin.

Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP.196508171988031002